



2025

LAPORAN

KINERJA

TRIWULAN II

Direktorat Pemberdayaan Usaha
Direktorat Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kasih sayang-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2025.

Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan II Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi.

Sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, adalah Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2025-2029 serta Target Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2025 berikut realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pemberdayaan Usaha.

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan pemacu peningkatan kinerja bagi organisasi Direktorat Pemberdayaan Usaha. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi para pembaca dalam memperkaya pengetahuan tentang investasi dan keberlanjutan usaha di sektor kelautan dan perikanan. Kritik dan saran membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha ke depan.

Jakarta, 3 Juli 2025

Direktur Pemberdayaan Usaha



Catur Sarwanto

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh kebijakan yang ditempuh selama Tahun 2025 merupakan lanjutan dari kebijakan tahun 2024. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja (*performance results*) Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP selama periode triwulan II Tahun 2025, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) Tahun 2025 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP melakukan pengukuran terhadap Kegiatan Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan untuk mencapai tujuan strategis meningkatkan nilai investasi dan pembiayaan usaha kelautan dan perikanan.

Tujuan strategis di atas selanjutnya dijabarkan dalam sasaran strategis Direktorat Pemberdayaan Usaha yang telah ditetapkan dalam bentuk perjanjian kinerja antara Direktur Usaha dan Investasi dengan Direktur Jenderal PDSPKP, yang terdiri atas 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS) dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja.

Dari 11 indikator kinerja tersebut sebanyak 4 (empat) telah dilakukan pengukuran pada Triwulan II Tahun 2025, sedangkan indikator kinerja lainnya belum dapat diukur karena tidak ada target capaian pada triwulan II. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut ke-4 indikator kinerja telah mencapai target Triwulan II tahun 2025. Dengan capaian dimaksud, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Ditjen PDSPKP pada Triwulan II Tahun 2025 yang ditunjukkan pada Aplikasi Kinerjaaku adalah sebesar 113,75%.

Perincian capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Dari 11 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 6 indikator kinerja bersifat tahunan, 1 indikator kinerja bersifat semesteran, dan 4 indikator kinerja bersifat triwulanan.
2. Sebanyak 6 indikator kinerja dimaksud yaitu (1) Persentase UMKM pengolahan produk KP yang meningkat omset, (2) Persentase peningkatan kinerja lembaga usaha sektor kelautan dan perikanan, (3) Persentase penyelesaian temuan BPK di

lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha, (4) Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pemeliharaan predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha, (5) Nilai penilaian mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha, (6) Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha.

3. Sebanyak 1 indikator kinerja yang bersifat semesteran yaitu Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP.
4. Sedangkan 4 indikator kinerja yang bersifat triwulanan yaitu (1) Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan, (2) Jumlah Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran yang diterbitkan, (3) Nilai Pembiayaan usaha KP melalui Kredit Program, (4) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha.
5. Pencapaian realisasi indikator kinerja triwulan II atas 4 indikator yang bersifat triwulanan adalah (1) Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan diperkirakan mencapai Rp4,13 Triliun atau dengan kata lain tercapai 118,68% dari target Triwulan II (2) Jumlah Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran yang diterbitkan, telah teralisasi 34 izin usaha atau dengan kata lain tercapai 170% dari target triwulan II; (3) Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Omsetnya telah terealisasi sebesar 1,5% atau tercapai 150% dari target triwulan II; (4) Nilai Pembiayaan usaha KP melalui Kredit Program teralisasi sebesar Rp3,56 Triliun atau dengan kata lain tercapai 118,67% dari target triwulan II; (5) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha, tercapai 100% atau dengan kata lain tercapai 105,26% dari target triwulan II; dan (6) Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha terealisasi 87,67 atau tercapai 100,77% dari target triwulan II.

Pada Triwulan II Tahun 2025, anggaran Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan yang dikelola oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha adalah sebesar Rp12.619.500.000,-. Dari pagu anggaran awal tersebut, terdapat blokir sebesar Rp10.920.712.000,-, sehingga pagu anggaran efektif menjadi sebesar Rp1.698.788.000,-. Penyerapan anggaran Direktorat Pemberdayaan Usaha pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar Rp318.585.788,- atau setara dengan 2,52% terhadap total pagu anggaran awal atau 18,75% terhadap pagu anggaran pasca blokir.

Pencapaian terhadap target sasaran kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha yang telah dicapai selama triwulan II Tahun 2025, serta rencana tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang dihadapi diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya, agar target yang ditetapkan dapat tercapai. Hasil analisis yang komprehensif terhadap masing-masing Indikator Kinerja diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya, agar kinerja dapat dijalankan lebih baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1.	10
1.2.	11
1.3.	11
1.4.	13
1.5.	15
1.6.	16
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	9
2.1.	18
2.2.	29
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1.	31
3.2.	32
3.2.1.	33
Meningkatnya investasi kelautan dan perikanan	20
IK1. Nilai investasi kelautan dan perikanan.	20
IK2. Jumlah Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan Dan Pemasaran Yang Diterbitkan	27
3.2.2. Sasaran Strategis 2	31
Meningkatnya omset UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan	31
IK3. Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan Yang Meningkatkan Omsetnya	31
IK4. Persentase Peningkatan Kinerja Lembaga Usaha Sektor Kelautan Dan Perikanan	33
IK5. Nilai Pembiayaan Usaha Kelautan Dan Perikanan Melalui Kredit Program	40

3.2.3 Sasaran Strategis 3	46
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan	46
IK6. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha	46
IK7. Persentase penyelesaian temuan BPK di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha	47
IK8. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha	47
IK9. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha	48
IK10. Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha	49
IK11. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha	50
BAB IV. PENUTUP	52
4.1.	84
4.2.	85
4.3.	85
Tindak lanjut yang telah dilaksanakan atas rekomendasi pada triwulan IV 2023, sebagai berikut:	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha tahun 2025	16
Tabel 2 Capaian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan I Tahun 2025	19
Tabel 3 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai investasi kelautan dan perikanan pada Triwulan I Tahun 2025	20
Tabel 4 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan Dan Pemasaran Yang Diterbitkan Triwulan I Tahun 2025	28
Tabel 5 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan yang meningkat omsetnya Triwulan I Tahun 2025	33
Tabel 6 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan kinerja lembaga usaha sektor kelautan dan perikanan Triwulan I 2025	35
Tabel 7 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program Triwulan I 2025	41
Tabel 8 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan I Tahun 2025	47
Tabel 9 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2025	48
Tabel 10 Ikhtisar Pencapaian Indikator Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan I Tahun 2025	50
Tabel 11 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan I Tahun 2025	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Unit Kerja (Orang)	4
Gambar 1. 2 Proporsi Jumlah Pegawai (ASN) menurut Golongan	5
Gambar 1. 3 Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin	5
Gambar 1. 4 Jumlah Pegawai (ASN) menurut Pendidikan	6
Gambar 3. 1 Dashboard Nilai NPSS Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan II	31
Gambar 3. 2 Capaian Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan berdasarkan Sumber Permodalan Triwulan II 2024 - 2025.....	34
Gambar 3. 3 Promosi Peluang Investasi Industri Pengolahan Ikan Terintegrasi Tuna di Tual, Maluku.....	36
Gambar 3. 4 Pendampingan dan Audiensi Minat Investasi eksportir Ikan Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	37
Gambar 3. 5 Pendampingan Investasi PT Kenddo Fisheries Indonesia.....	38
Gambar 3. 6 Pendampingan Investasi PT Pacific Blue Marlin.....	40
Gambar 3. 7 Pendampingan Investasi PT. Lautan Sakti Jaya	41
Gambar 3. 8 Pendampingan Investasi PT Industri Perikanan Terpadu Indonesia Chiu Shih	42
Gambar 3. 9 Jumlah Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran yang diterbitkan	43
Gambar 3. 10 Implementasi pelayanan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan.....	45
Gambar 3. 11 Sosialisasi Kebijakan Perizinan Berusaha Sektor KP	46
Gambar 3. 12 Kegiatan pembinaan dan pendampingan wirausaha KP	48
Gambar 3. 13 Sosialisasi Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada tanggal 24 April 2025.....	52
Gambar 3. 14 Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Jawa Timur pada tanggal 30 April 2025.....	54
Gambar 3. 15 Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih di Kabupaten Pandeglang, Banten pada tanggal 7 Mei 2025	55
Gambar 3. 16 Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 6 Mei 2025	57

Gambar 3. 17 Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 15 Mei 2025	58
Gambar 3. 18 Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 21-22 Mei 2025 pada tanggal 21-22 Mei 2025	59
Gambar 3. 19 Pendampingan Kunker Wamen KP di Desa Pangkahwetan Kabupaten Gresik pada tanggal 26 Mei 2025	60
Gambar 3. 20 Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung pada tanggal 27-28 Mei 2025	61
Gambar 3. 21 Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 3 Juni 2025 pada tanggal 2-3 Juni 2025	63
Gambar 3. 22 Rapat Rutin Koordinasi Rutin Wilayah IV (Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT) dalam rangka Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	65
Gambar 3. 23 Pembahasan Mock UP/Percontohan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	66
Gambar 3. 24 Gambar Realisasi Kredit Program Berdasarkan Sektor Usaha Perikanan	68
Gambar 3. 25 Rapat Inisiasi Kredit dan Akses Pembiayaan Berbasis Komunal di Kabupaten Trenggalek	70
Gambar 3. 26 Rapat Koordinasi Pokja Kredit Program	72
Gambar 3. 27 Rapat Koordinasi Inisiasi Kredit dan Akses Pembiayaan Berbasis Komunal di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	73
Gambar 3. 28 Rapat Koordinasi Persiapan Pemetaan Tingkat Literasi Keuangan Umkm Kelautan Dan Perikanan	76
Gambar 3. 29 Rapat Survei Literasi Keuangan Umkm Sektor Kelautan Dan Perikanan	77
Gambar 3. 30 Tangkap Layar Aplikasi SIDAK pada 30 Juni 2025	79

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kelautan dan perikanan melalui program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diarahkan dalam rangka mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing di pasar domestik dan internasional dengan menerapkan sistem industri yang efisien dan nir-limbah. Kebijakan dimaksud mengacu pada pendekatan *market driven* atau pasar yang menjadi acuan kebijakan, sehingga ketersediaan produk dapat diterima dan diminati oleh konsumen. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus merupakan produk kelautan dan perikanan yang memiliki sifat *high quality, safe, traceable, high value content* dan *competitive*. Kebijakan ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis Ditjen PDSPKP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat

sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP menyusun Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan I Tahun 2025. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu Triwulan I Tahun 2025.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP Tahun 2025 adalah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya.

Adapun Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP Tahun 2025 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran strategis pada Tahun 2025 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah.

1.3. Tugas dan Fungsi

Sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi agar terwujud organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, dan adanya persetujuan tertulis dari Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, pada tanggal 10 Februari 2025, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan adanya penetapan tersebut, maka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor dinyatakan tidak berlaku.

Dalam Pasal 176 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tersebut, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Prasarana dan Sarana
- c. Direktorat Pemberdayaan Usaha;
- d. Direktorat Pengolahan;
- d. Direktorat Pemasaran; dan
- e. Direktorat Akses dan Promosi.

Selanjutnya dalam Pasal 187 Peraturan Menteri tersebut, Direktorat Pemberdayaan Usaha mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pemberdayaan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemetaan dan analisis pemberdayaan usaha dan investasi, fasilitasi pengelolaan literasi keuangan, pendampingan kewirausahaan, fasilitasi pengembangan kelembagaan, dan fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha kelautan dan perikanan, serta perizinan pengolahan ikan dan pemasaran ikan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dan analisis pemberdayaan usaha dan investasi, fasilitasi pengelolaan literasi keuangan, pendampingan kewirausahaan, fasilitasi pengembangan kelembagaan, dan fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha kelautan dan perikanan, serta perizinan pengolahan ikan dan pemasaran ikan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan dan analisis pemberdayaan usaha dan investasi, fasilitasi pengelolaan literasi keuangan, pendampingan kewirausahaan, fasilitasi pengembangan kelembagaan, dan fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha kelautan dan perikanan, serta perizinan pengolahan ikan dan pemasaran ikan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan dan analisis pemberdayaan usaha dan investasi, fasilitasi pengelolaan literasi keuangan, pendampingan kewirausahaan, fasilitasi pengembangan kelembagaan, dan fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha kelautan dan perikanan, serta perizinan pengolahan ikan dan pemasaran ikan;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemetaan dan analisis pemberdayaan usaha dan investasi, fasilitasi pengelolaan literasi keuangan,

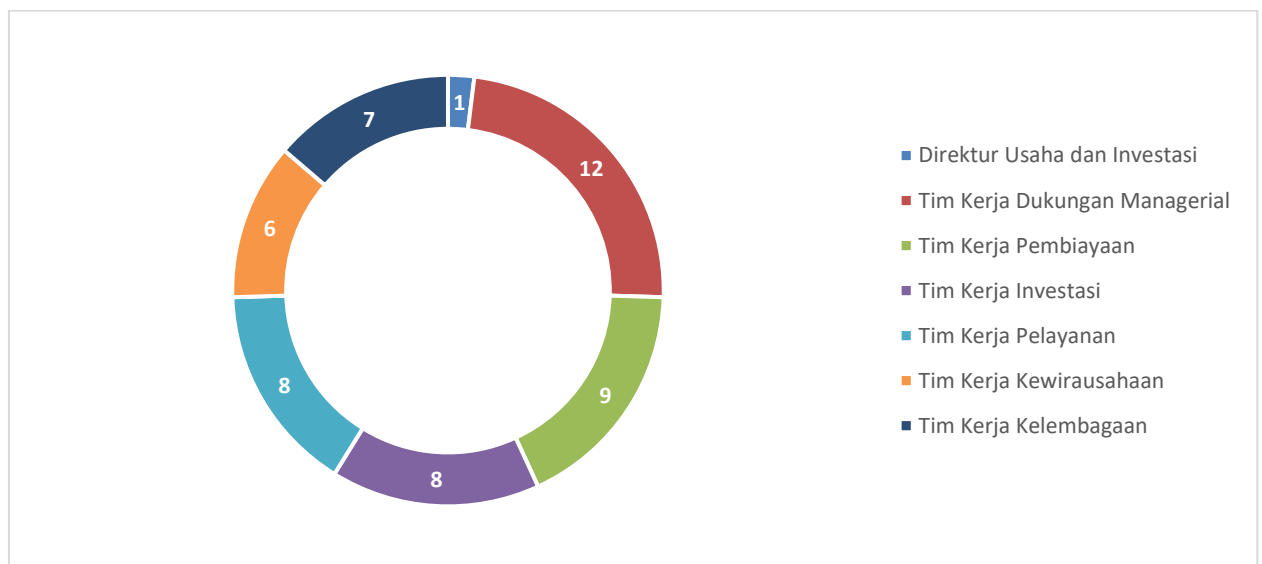
pendampingan kewirausahaan, fasilitasi pengembangan kelembagaan, dan fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha kelautan dan perikanan, serta perizinan pengolahan ikan dan pemasaran ikan; dan

f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pemberdayaan Usaha.

1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia atau pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP Tahun 2025 berjumlah 51 orang, yang terdiri atas 35 orang Aparatur Sipil Negeri (ASN), 8 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, 3 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 5 orang Pegawai dengan status Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang tersebar di 6 Tim Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

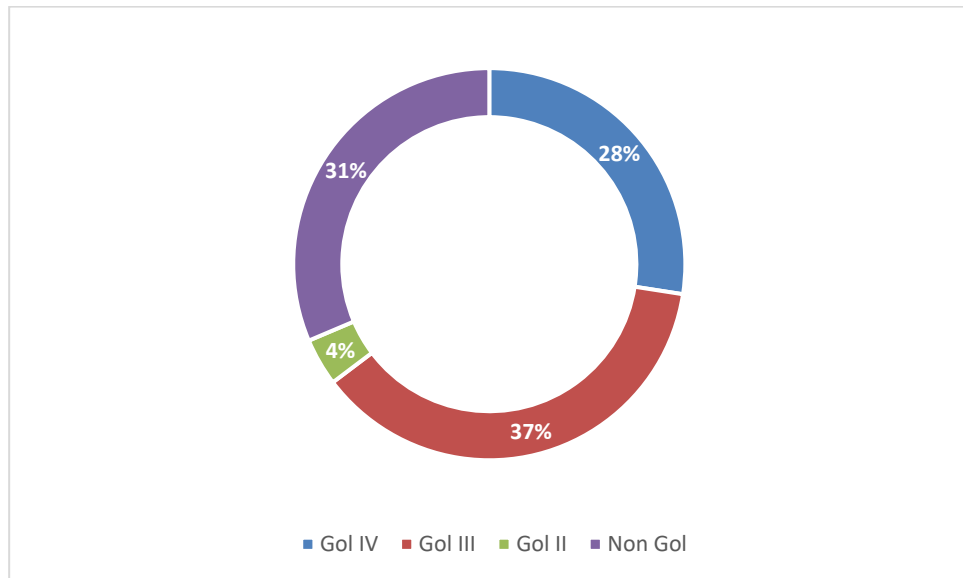
1. Jumlah pegawai berdasarkan unit kerja, meliputi Direktur sebanyak 1 orang, Tim Kerja Investasi sebanyak 8 orang; Tim Kerja Pelayanan dan Kemitraan sebanyak 9 orang; Tim Kerja Pembiayaan sebanyak 9 orang; Tim Kerja Kewirausahaan 7; Tim Kerja Kelembagaan sebanyak 8 orang; dan Tim Kerja Dukungan Manajerial sebanyak 12 orang.



Gambar 1. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Unit Kerja (Orang)

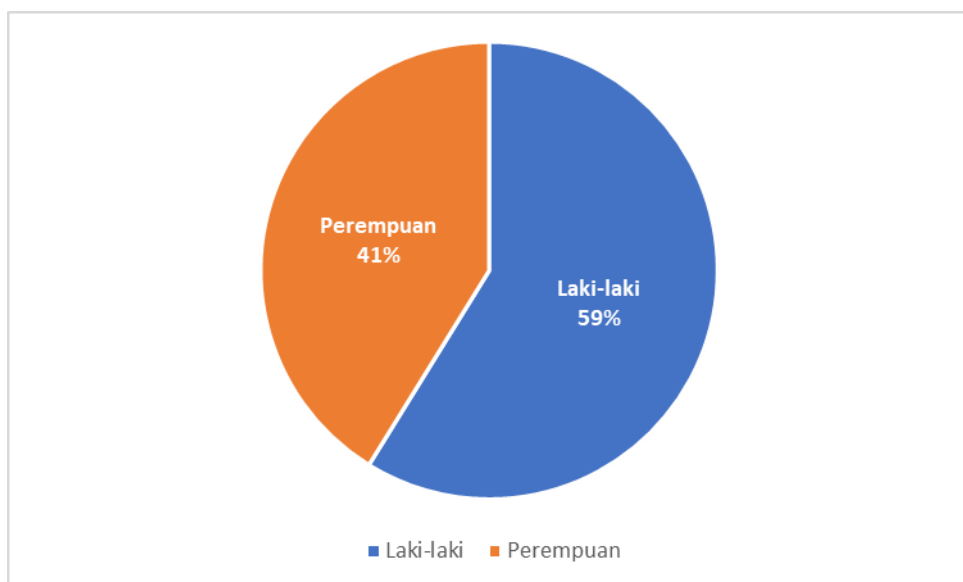
2. Jumlah pegawai menurut golongan khusus ASN, meliputi golongan IV sebanyak 14 orang, golongan III sebanyak 19 orang, golongan II sebanyak 2 orang dan Non

Golongan sebanyak 16 orang. Menurut golongannya, pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha terbanyak pada golongan III, yakni 37%.



Gambar 1. 2 Proporsi Jumlah Pegawai (ASN) menurut Golongan

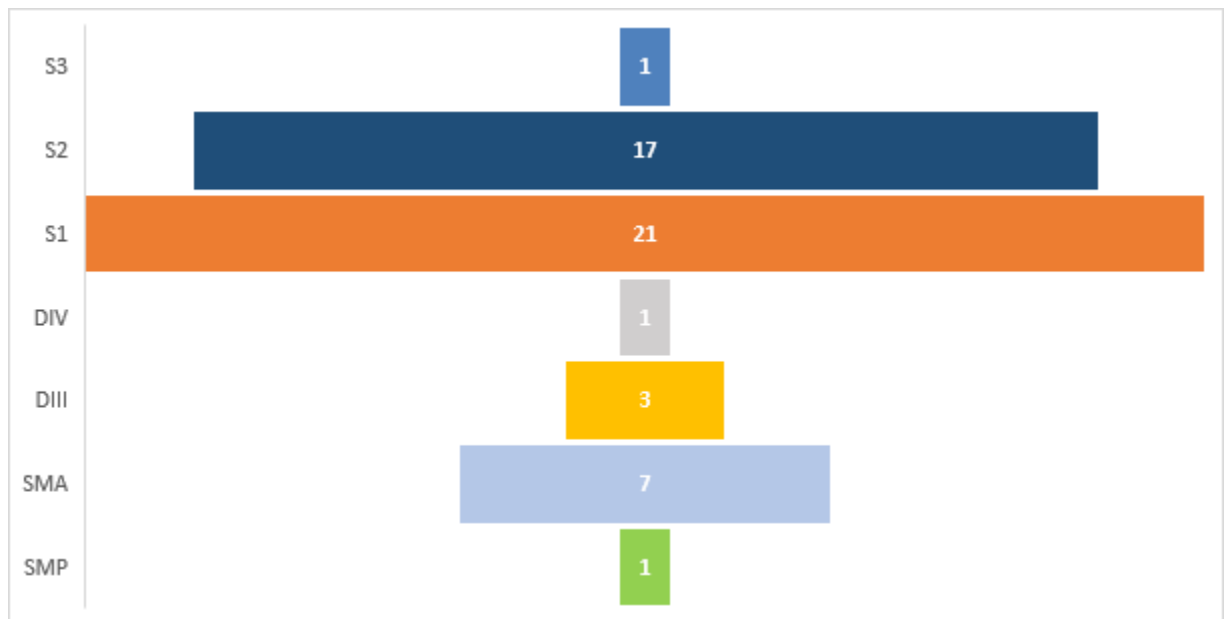
- Jumlah pegawai menurut jenis kelamin, meliputi laki-laki sebanyak 30 orang, atau 59% dari total pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha, dan perempuan sebanyak 21 orang, atau 41% dari total pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha.



Gambar 1. 3 Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin

- Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan, meliputi S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 17 orang, S1 sebanyak 21 orang, D4 sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 3

orang, SLTA sebanyak 7 orang dan SMP sebanyak 1 orang. Menurut tingkat pendidikannya, pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha terbanyak dengan tingkat pendidikan S1, yakni mencapai 41%.



Gambar 1. 4 Jumlah Pegawai (ASN) menurut Pendidikan

1.5. Permasalahan Utama

Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, khususnya terkait pembangunan hilirisasi industri melalui upaya penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Permasalahan dan tantangan tersebut berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur pengolahan, akses modal terbatas, rantai pasok belum efisien, kualitas SDM dan teknologi yang kurang memadai, rendahnya nilai tambah produk, akses pasar terbatas dan lemahnya branding, dan kebijakan dan kordinasi yang belum sinkron.

Dari sisi pemanfaatan potensi sumberdaya, berbagai upaya untuk peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan perlu terus dilakukan dalam rangka penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Disisi lain, kemudahan dalam berusaha bagi pelaku usaha mikro-kecil dan usaha menengah-besar, dan akses terhadap sumberdaya (modal, teknologi, sarpras, tenaga kerja) juga perlu mendapatkan perhatian.

Dampak kondisi perekonomian nasional saat ini terhadap perkembangan sektor usaha kelautan dan perikanan sangat signifikan karena sektor ini sangat bergantung pada stabilitas ekonomi, kebijakan fiskal, perdagangan, dan daya beli masyarakat,

utamanya bagi pelaku usaha mikro kecil. Untuk itu diperlukan upaya dan strategi yang mampu beradaptasi dengan kondisi yang terjadi saat ini, agar kehadiran pemerintah dalam memberikan kemudahan dalam berusaha dan berinvestasi dapat dirasakan oleh masyarakat.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan diantaranya:

1. Penyediaan informasi peluang investasi usaha di sektor kelautan dan perikanan yang siap ditawarkan (*ready to offer*).
2. Pelayanan kemudahan berusaha di sektor kelautan dan perikanan.
3. Penguatan korporasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan dalam kerangka *Major Project* Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.
4. Fasilitasi kemitraan dan kerja sama usaha dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
5. Fasilitasi akses pembiayaan dari lembaga keuangan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan.
6. Peningkatan literasi utamanya tentang manajemen usaha dan pengelolaan keuangan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah.

1.6. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP selama Tahun 2025, termasuk didalamnya capaian kinerja pada Triwulan I 2025. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Triwulan I Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Triwulan I Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menyajikan tujuan, sasaran, capaian kinerja;

2. **Bab I Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum tentang Direktorat Pemberdayaan Usaha, dengan penekanan kepada aspek strategis Direktorat Pemberdayaan Usaha serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha;
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2025;
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Direktorat Pemberdayaan Usaha sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Disamping itu, dalam Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
5. **Bab IV Penutup**, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Direktorat Pemberdayaan Usaha untuk meningkatkan kinerjanya;
6. **Lampiran.**

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha menginduk pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) yang dituangkan dalam rancangan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Renstra Ditjen PDSPKP) Tahun 2025-2029. Dokumen renstra merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif terkait pembangunan daya saing produk kelautan dan perikanan pada lima tahun mendatang.

2.1.1 Visi

Visi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 ditujukan untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045 dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029. Pada rancangan RPJPN, Visi Indonesia Emas 2045 dibagi dalam beberapa tahapan yang dilakukan secara terukur dan konsisten. Tahap pertama (tahun 2025- 2029), difokuskan pada penguatan fondasi transformasi. Tahap kedua (tahun 2030-2034), melakukan akselerasi untuk mewujudkan transformasi yang sudah diperkuat fondasinya. Selanjutnya pada tahap ketiga (tahun 2035-2039), Indonesia memulai langkah untuk melakukan ekspansi global. Kemudian pada tahap terakhir RPJPN (tahun 2040-2045), Indonesia diharapkan dapat mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu

"Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan".

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung dua dari lima agenda transformasi yang didukung KKP, yaitu: (a) **transformasi ekonomi**, dan (b) **ketahanan sosial budaya dan ekologi**. Dukungan tersebut akan dikuatkan dengan strategi sebagai berikut : (a) Hilirisasi Penangkapan Ikan berbasis komoditas unggulan, (b) Meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha, (c) Peningkatan tata kelola dan kinerja sistem logistik ikan nasional termasuk

pengembangan sistem telusur logistik ikan nasional, (d) Pengembangan industri pengolahan dan pemasaran untuk mendukung hilirisasi dan peningkatan nilai tambah, (e) Meningkatkan mutu, nilai tambah, dan daya saing produk kelautan dan perikanan, (f) Penguatan pasar dalam negeri melalui peningkatan akses kemudahan Masyarakat dan (g) Penguatan pasar luar negeri.

2.1.2 Misi

Misi Ditjen PDSPKP akan mendukung Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden (Bab 1) serta Misi KKP yang mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan untuk melaksanakan misi Presiden dan wakil Presiden dalam rancangan RPJMN tahun 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan 7 dari 8 Misi/Asta Cita yang dirumuskan sebagai berikut:

1. **“Meningkatkan kualitas lingkungan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan”** yang menjabarkan **Misi Asta Cita 8**, Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;
2. **“Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan”** yang menjabarkan **Misi Asta Cita 2**, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru dan **Misi Asta Cita 6**, Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
3. **“Meningkatkan nilai tambah, hilirisasi dan penjaminan kualitas Produk Kelautan dan Perikanan”** yang menjabarkan **Misi Asta Cita 3**, Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif

koperasi dan **Misi Asta Cita 5**, Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

4. **“Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan”** yang menjabarkan **Misi Asta Cita 4**, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; dan
5. **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas”** yang menjabarkan **Misi Asta Cita 7**, Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

Dari lima misi KKP tersebut, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung tiga misi, yaitu:

- (a) Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan,
- (b) Meningkatkan nilai tambah, hilirisasi dan penjaminan kualitas Produk Kelautan dan Perikanan, dan
- (c) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas

2.1.3 Tujuan

Guna mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan, maka perlu dirumuskan tujuan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan untuk tahun 2025-2029. Mengacu rancangan Renstra KKP tahun 2025-2029, ada lima tujuan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025-2029, yaitu:

- a. Meningkatnya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana;
- b. Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang didukung dengan pengawasan yang tangguh dan efektif;
- c. Meningkatnya daya saing dan mutu hasil produk kelautan dan perikanan;
- d. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan

- e. Birokrasi yang efektif dan efisien yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik

Dari lima tujuan tersebut, yang menjadi tujuan dari pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan adalah **“meningkatkan mutu dan daya saing hasil produk kelautan dan perikanan”**. Tujuan pembangunan tersebut akan dicapai melalui program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan selama tahun 2025-2029.

2.1.4 Sasaran

Sasaran strategis (SS) pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) sebagai *outcome/impact* dari program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan pada tahun 2025-2029. Sebagai organisasi di bawah KKP, sasaran strategis Ditjen PDSPKP melekat pada sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu:

- SS-1 Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi, Serta Terwujudnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Laut
- SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan Perikanan
- SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan
- SS-4 Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten
- SS-5 Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas.

Dari lima sasaran strategis tersebut, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung secara langsung dua sasaran strategis, yaitu: **SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan**, dan **SS-5 Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas**.

2.1.5 Kebijakan

Dalam rangka mendukung arah kebijakan nasional pada Bagian A dan kebijakan KKP pada Bagian B, maka perlu disusun beberapa target capaian pada pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2025-2029. Penyusunan target capaian ini juga memperhatikan agenda penguatan transformasi yang didukung

KKP, sasaran strategis KKP yang didukung Ditjen PDSPKP, serta tujuan pembangunan PDSPKP tahun 2025-2029 yang disampaikan pada Bab 2. Terkait agenda penguatan transformasi yang didukung KKP, Ditjen PDSPKP mendukung agenda transformasi ekonomi dan agenda ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Pada agenda **transformasi ekonomi**, yang didukung oleh Ditjen PDSPKP adalah:

- ❖ IE 4: Iptek inovasi dan produktivitas ekonomi, yaitu untuk agenda yang berkaitan dengan:
 - Pengembangan UMKM kelautan dan perikanan tembus pasar global
 - Kemudahan akses pembiayaan
- ❖ IE 7: Integritas ekonomi domestik global, yaitu untuk agenda yang berkaitan dengan:
 - Peningkatan investasi asing serta integrasi produk KP pada skema GPN
 - Penguatan sistem logistik ikan nasional
 - Penyediaan sarana dan prasarana pendukung hilirisasi
 - Transformasi digital pemasaran produk dan jasa ekosistem kelautan dan perikanan

Selanjutnya pada agenda **ketahanan sosial budaya dan ekologi**, yang didukung oleh Ditjen PDSPKP adalah:

- ❖ IE 16: Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan
 - Penyediaan sistem rantai dingin yang merata
 - Pengembangan pangan akuatik (*blue foods*)
 - Penanganan *stunting* melalui kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)

Dengan memperhatikan semua arahan tersebut, maka target capaian pada pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 yang kemudian menjadi arah kebijakan Ditjen PDSPKP pada tahun 2025-2029, dinyatakan:

“Kebijakan PDSPKP : Mewujudkan produk kelautan dan perikanan Indonesia yang berdaya saing di pasar domestik dan ekspor”

Kebijakan dan strategi tersebut nantinya akan diimplementasikan melalui beberapa program dan kegiatan yang berbasis ekonomi biru, sehingga mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Program dan kegiatan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 tersebut adalah:

a. **Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.**

- ❖ Kegiatan PDSDKP-1: Prasarana dan Sarana hasil kelautan dan perikanan
- ❖ Kegiatan PDSDKP-2: Investasi dan Keberlanjutan Usaha Kelautan dan Perikanan
- ❖ Kegiatan PDSDKP-3: Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan
- ❖ Kegiatan PDSDKP-4: Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
- ❖ Kegiatan PDSDKP-5: Akses dan Promosi Kelautan dan Perikanan

b. **Program Dukungan Manajemen.** Program ini dilakukan melalui kegiatan pembangunan penguatan daya saing produk KP tahun 2025-2029, yaitu:

- ❖ Kegiatan PDSDKP-6: Dukungan Manajemen Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Adapun strategi pelaksanaan untuk kebijakan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat Pemberdayaan Usaha adalah:

1. **Pemetaan dan analisis pemberdayaan usaha dan investasi**

Mengidentifikasi dan menganalisa potensi dan peluang **usaha dan investasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan** sehingga potensi dan peluang tersebut dapat dipetakan dan siap ditawarkan kepada para calon pelaku usaha atau investor.

Langkah operasional yang perlu diupayakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

- 1) Identifikasi potensi pemberdayaan usaha dan investasi bidang pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan hasil perikanan pada suatu kawasan atau wilayah
- 2) Analisa potensi usaha dan investasi menjadi satu peluang usaha dan investasi komoditas unggulan pada suatu kawasan atau wilayah yang siap ditawarkan kepada calon pelaku usaha atau investor

- 3) Pemetaan peluang usaha dan investasi bidang pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan hasil perikanan

2. fasilitasi literasi keuangan dan Akses Pembiayaan Usaha Kelautan Dan Perikanan

1) Literasi Keuangan

Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

- Identifikasi tingkat literasi keuangan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
- Analisa intervensi yang dibutuhkan untuk masing-masing tingkatan literasi keuangan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
- Penyusunan bahan dan materi sosialisasi dan edukasi sesuai dengan tingkatan literasi keuangan pelaku usaha kelautan dan perikanan
- Sosialisasi dan edukasi bahan dan materi literasi keuangan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan
- Penyelenggaraan bimbingan teknis literasi keuangan kepada pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- Pendampingan literasi keuangan kepada pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan literasi keuangan pelaku usaha kelautan dan perikanan

3. Akses Pembiayaan

Kegiatan fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha bertujuan untuk mendukung pertumbuhan sektor usaha, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Dengan adanya fasilitasi ini, diharapkan pelaku usaha dapat mengakses sumber pembiayaan yang lebih mudah, terjangkau, dan berkelanjutan, serta menjalin kemitraan yang menguntungkan untuk memperluas skala bisnis mereka. Dengan kemudahan akses pembiayaan dan kemitraan, diharapkan usaha kecil

dapat berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Selanjutnya, langkah-langkah untuk peningkatan akses melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan Ultra Mikro, dan dana bergulir adalah:

- Identifikasi calon debitur potensial berbasis kelas UMKM dan/atau data KUSUKA
- Fasilitasi akses pembiayaan usaha kelautan dan perikanan;
- Pembinaan klaster pembiayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- Pembentukan Pokja Kredit Program melibatkan lembaga penyalur kredit program
- Sinergi mendukung program prioritas KKP dalam hal fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha sektor kelautan dan perikanan
- Penyusunan juknis penyaluran KUR sektor kelautan dan perikanan
- Penyusunan laporan kebutuhan pembiayaan usaha
- Evaluasi kebutuhan pembiayaan oleh Tim Pokja Kredit Program
- Penetapan kelayakan pembiayaan dan jenis kredit yang diberikan
- Pendampingan akses pembiayaan oleh tenaga pendamping atau penyuluh perikanan
- Fasilitasi penyaluran kredit melalui lembaga penyalur kredit program Pemerintah
- Analisis dampak pelaku usaha penerima kredit program;

4. **Fasilitasi Pendampingan Kewirausahaan dan Pembentukan Wirausaha Baru Bidang Pengolahan dan Pemasaran**

Kegiatan ditujukan untuk: (a) menumbuhkan jiwa dan motivasi berwirausaha, (b) menciptakan wirausaha baru produk KP yang inovatif dan kreatif, (c) meningkatkan kapasitas wirausaha yang akan naik kelas, (d) membentuk wirausaha berkarakter kuat dan handal, dan (e) Penguatan kapasitas usaha menuju wirausaha mapan dan calon wirausaha ekspor.

Sasaran **penumbuhan usaha** baru adalah siswa/purna siswa sekolah menengah atas/kejuruan, mahasiswa/alumni perguruan tinggi dan masyarakat umum. Sedangkan **sasaran pendampingan** wirausaha adalah pelaku usaha/wirausaha yang membutuhkan pendampingan usaha. **Langkah-langkah**

yang perlu dilakukan untuk menumbuhkan wirausaha kelautan dan perikanan adalah:

1. Sosialisasi kewirausahaan untuk memberikan informasi dan gambaran tentang wirausaha dan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam berwirausaha.
2. Analisis kebutuhan untuk menggali informasi terkait hal-hal yang dibutuhkan oleh calon wirausaha dalam membangun sebuah usaha
3. Seleksi calon wirausaha yang benar-benar berminat dan tidak beralih ke pekerjaan lain
4. Pelatihan peningkatan kapasitas calon wirausaha/wirausaha yang akan naik kelas.

5. Fasilitas Pengembangan Kelembagaan Usaha dan Kemitraan Usaha

1. Kelembagaan Usaha

Fasilitas pengembangan kelembagaan menjadi titik awal untuk membangun ekosistem usaha dalam mendorong pengembangan dan keberlanjutan usaha yang berdaya saing. Upaya yang dilakukan yaitu dengan memperkuat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaku usaha agar mampu meningkatkan efisiensi biaya dan meningkatkan posisi tawar sehingga dapat meningkatkan skala usaha dan kesejahteraan pelaku usaha. Sasaran pengembangan kelembagaan usaha adalah pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan. Target dari kegiatan fasilitas pengembangan kelembagaan usaha adalah transformasi kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan yang mandiri dan berkelanjutan.

Langkah operasional yang dilakukan dalam pelaksanaan pengembangan kelembagaan usaha meliputi :

- 1) Penyadartahuan pelaku usaha terhadap status lembaga usaha berbadan hukum
- 2) Fasilitas pembentukan lembaga usaha berbadan hukum
- 3) Identifikasi pelaku usaha yang berpotensi ditingkatkan kapasitas kelembagaan usahanya

- 4) Perumusan model kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan yang sesuai di kawasan pengembangan
- 5) Penguatan kelembagaan usaha melalui serangkaian kegiatan pendampingan, pembinaan dan bimbingan teknis
- 6) Pengembangan kelembagaan usaha berbasis korporasi
- 7) Pembentukan dan pembinaan lembaga inkubator bisnis
- 8) Pengembangan usaha di dalam dan luar kawasan usaha
- 9) Monitoring dan evaluasi kinerja lembaga usaha

2. Kemitraan

Fasilitasi ditujukan untuk mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan investasi dengan membentuk jaringan kerjasama antara koperasi, UMKM dan usaha besar, usaha hulu dan usaha hilir dengan tujuan yang sama untuk menjalankan suatu bisnis dan mencari keuntungan.

Langkah operasional pelaksanaan fasilitasi kemitraan meliputi :

1. Identifikasi kebutuhan kemitraan
2. Fasilitasi dan pendampingan usaha perikanan sektor hulu (tangkap dan budidaya) untuk bermitra dengan usaha hilir (pengolahan dan pemasaran hasil perikanan)
3. Fasilitasi kerjasama usaha mikro kecil dan koperasi yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan dengan industri pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
4. Fasilitasi kerjasama UMKM hasil kelautan dan perikanan dengan BUMN dalam rangka mengakses Program Kemitraan BUMN
5. Fasilitasi dan pendampingan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan untuk bermitra dengan distributor dan jaringan pemasaran digital.

6. Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan dan Pemasaran Ikan Serta Pendampingan Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan

Perizinan berusaha merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Sistem perizinan berusaha saat ini dilaksanakan berbasis risiko, *post audit* dan terintegrasi dalam

Online Single Submission (OSS). Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Pemberdayaan Usaha mendapatkan mandat melaksanakan fasilitasi pelayanan perizinan berusaha sub sektor pengolahan, pemasaran dan jasa pasca panen untuk setiap pelaku usaha dengan status PMA.

Tujuan utama fasilitasi pelayanan perijinan berusaha adalah memberikan keterbukaan akses informasi kepada pelaku usaha perihal persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu perijinan serta melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, dengan harapan pelaku usaha mendapatkan pelayanan yang terbaik dan merasakan manfaat atas pelayanan perijinan yang diberikan. Alur perizinan berusaha sub sektor pengolahan dan pemasaran ikan adalah:

1. Mendaftar melalui situs <http://oss.go.id> untuk mendapatkan akses dengan membuat akun nama pengguna dan kata sandi
2. Memasukkan bidang usaha, nilai investasi serta kelengkapan data pendukung maka sistem akan menerbitkan NIB
3. Sistem OSS RBA akan memverifikasi pengajuan pada tahapan status disetujui, kurang lengkap, atau ditolak
4. Jika mengambil KBLI dengan tingkat risiko menengah rendah izin usahanya terbit otomatis, sedangkan KBLI dengan tingkat berisiko menengah tinggi wajib memiliki NIB dan sertifikat standar
5. Sertifikat standar yang telah terverifikasi merupakan izin usaha dan bisa digunakan untuk mengurus PB untuk menunjang kegiatan usaha (UMKU) untuk operasional dan komersial
6. Kewajiban pelaku usaha setelah perizinan berusaha terbit:
 - Memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Skala usaha mikro dan kecil paling lama 2 (dua) tahun dan Skala usaha menengah dan besar paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan
 - Membuat laporan kegiatan usaha pengolahan ikan setiap 6 (enam) bulan kepada Penerbit Sertifikat Standar.

Pendampingan investasi dilakukan untuk menindaklanjuti rencana investasi dalam dokumen usulan perizinan berusaha sub sektor pengolahan, pemasaran dan jasa pasca panen. Selain itu, pendampingan investasi juga dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti hasil promosi peluang investasi kelautan dan perikanan yang berupa minat investasi pada sektor kelautan dan perikanan, baik dari PMA maupun PMDN. Upaya yang dilakukan untuk melakukan fasilitasi pelayanan perizinan berusaha sub sektor pengolahan, pemasaran dan jasa pasca panen, serta pendampingan investasi adalah:

1. Penyiapan bahan kebijakan pelayanan perizinan pengolahan ikan dan pemasaran ikan
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelayanan publik dalam rangka penguatan budaya layanan prima
3. Pendampingan perijinan berusaha, verifikasi dokumen rencana kegiatan usaha dan penerbitan perizinan berusaha
4. Sosialisasi kebijakan perizinan berusaha
5. Pelaksanaan pelayanan perizinan pengolahan ikan, pemasaran ikan, dan jasa pasca panen penangkapan ikan
6. Pendampingan pelaporan kegiatan usaha
7. Verifikasi calon investor yang minat investasi dan/atau memiliki rencana investasi di sektor kelautan dan perikanan
8. Pendampingan calon investor dalam rangka penyelesaian hambatan investasi, fasilitasi perolehan insentif fiskal dan non-fiskal, serta percepatan realisasi investasi
9. Analisis dan pemantauan capaian realisasi usaha dan investasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
10. Sosialisasi dan edukasi tata cara melakukan usaha dan investasi bidang kelautan dan perikanan di Indonesia.
11. Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam rangka pengukuran kinerja pelayanan perizinan pengolahan ikan dan pemasaran ikan

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penetapan sasaran strategis yang akan dicapai dan pengukuran tingkat keberhasilan dituangkan dalam dokumen rencana kinerja (*performance plan*) 2024.

Setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja dengan target kinerja. Perjanjian Kinerja yang telah disahkan sebagaimana disajikan pada Lampiran 1.

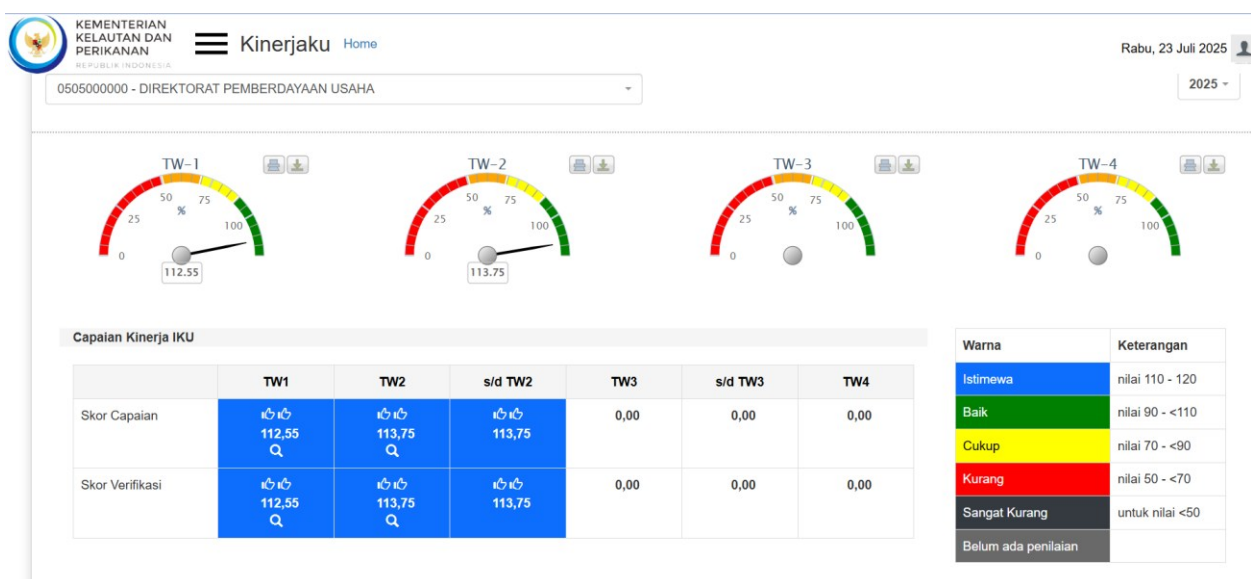
Tabel 1 Perjanjian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya investasi kelautan dan perikanan	1.	Nilai investasi kelautan dan perikanan (Rp. Triliun)	7,24
		2.	Jumlah perizinan berusaha sub sektor pengolahan dan pemasaran yang diterbitkan (sertifikat)	50
2.	Meningkatnya omset UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan	3.	Persentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan yang meningkat omsetnya (Persen)	5
		4.	Persentase peningkatan kinerja lembaga usaha sektor kelautan dan perikanan (Persen)	6
		5.	Nilai pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program (Rp. Triliun)	7,99
3.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	6.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Persen)	95
		7.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Persen)	100
		8.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pemeliharaan predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	75
		9.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	86
		10.	Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Indeks)	87
		11.	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha (Inovasi)	1

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja seluruh level lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). Capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan II Tahun 2025 pada SAPK dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 1 Dashboard Nilai NPSS Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan II

NPSS (Nilai Pencapaian Sasaran Strategis) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan. NPSS Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan II Tahun 2025 sebesar 113,75% dengan predikat Istimewa.

Direktorat Pemberdayaan Usaha pada Tahun 2025 menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS) dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja. Pengukuran capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis.

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha pada Triwulan II Tahun 2025, terdiri atas 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja.

Tabel 2 Capaian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Kinerja 105,26 (IK)	Target		Realisasi		
		2025	TW II	Sd TW II	% thd Target TW II	% sd thd Target 2025
1	Nilai investasi kelautan dan perikanan (Rp. Triliun)	7,24	3,48	4,13	118,68	57,04
2	Jumlah perizinan berusaha sub sektor pengolahan dan pemasaran yang diterbitkan (sertifikat)	50	20	34	170	68
3	Persentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan yang meningkat omsetnya (Persen)	5	1	1,5	150	30
4	Persentase peningkatan kinerja lembaga usaha sektor kelautan dan perikanan (Persen)	6	-	-	-	-
5	Nilai pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program (Rp. Triliun)	7,99	3,0	3,56	118,67	44,56
6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Persen)	95	95	100	105,26	105,26
7	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Persen)	100	-	-	-	-
8	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pemeliharaan predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	75	-	-	-	-
9	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	86	-	-	-	-
10	Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Indeks)	87	87	87,67	100,77	100,77
11	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha (Inovasi)	1	-	-	-	-

3.2.1. Sasaran Strategis 1

Meningkatnya investasi kelautan dan perikanan

IK1. Nilai investasi kelautan dan perikanan.

Investasi di sektor kelautan dan perikanan (KP) didefinisikan sebagai tindakan penanaman modal usaha di sektor KP dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Realisasi investasi kelautan dan perikanan merupakan realisasi investasi usaha perikanan (penangkapan dan budidaya), pengolahan dan perdagangan/pemasaran. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) terus berupaya mendorong peningkatan realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai kegiatan strategis, antara lain: penyediaan informasi peluang investasi, promosi investasi, pendampingan investasi, pemantauan dan pengendalian investasi. Kegiatan promosi usaha dan investasi dalam rangka mendukung program prioritas KKP, diantaranya yaitu Kampung Budidaya, peningkatan produksi komoditas unggulan, dan Penangkapan Ikan Terukur, serta mendukung peningkatan nilai ekspor hasil perikanan dalam rangka penguatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.

Realisasi investasi KP dihitung melalui penjumlahan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bersumber dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Investasi yang berasal dari PMA dan PMDN merupakan kontribusi perusahaan swasta, baik dalam negeri maupun asing terhadap pembangunan kelautan dan perikanan.

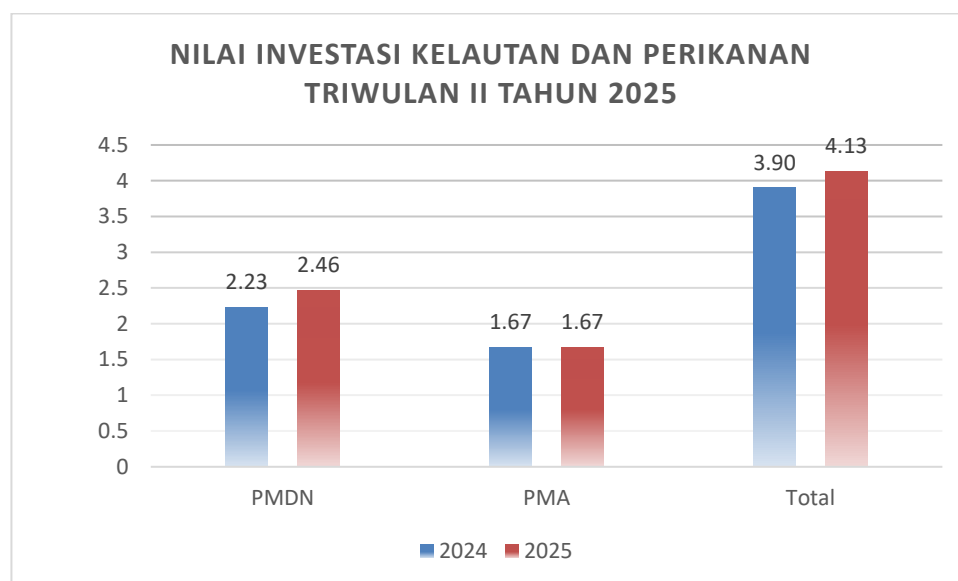
Dalam rangka mencapai target tersebut, Ditjen PDSPKP terus berupaya mendorong peningkatan realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai kegiatan strategis, antara lain penyediaan informasi peluang investasi, promosi investasi, pendampingan investasi, pemantauan dan pengendalian investasi. Kegiatan promosi usaha dan investasi dalam rangka mendukung program prioritas KKP yaitu Kampung Budidaya, peningkatan produksi udang, dan Penangkapan Ikan Terukur sebagai upaya penguatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung program peningkatan nilai ekspor hasil perikanan.

Tabel 3 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai investasi kelautan dan perikanan pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW II terhadap target 2025
	TW II 2025	TW IV 2024	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW IV 2024	TW II 2024	s.d TW II 2025	TW II 2025	TW IV 2024	TW II 2024	
Nilai investasi kelautan dan perikanan (Rp. Triliun)	3,48	9	4,41	7,24	4,13*	12,35	5,15	4,13*	118,68	45,88	93,65	57,04

Ket : * Angka Prognosa

Realisasi investasi KP pada triwulan II tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp4,13 triliun, yakni tercapai 118,65% jika dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2025 sebesar Rp3,48 triliun, atau mencapai 57,04% jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yakni Rp7,24 triliun. Jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya yaitu triwulan II tahun 2024 sebesar Rp3,91 triliun maka capaian ini mengalami peningkatan sebesar 5,60%.



Ket: *) angka prognosa

Sumber : Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, diolah Ditjen PDS

Gambar 3. 2 Capaian Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan berdasarkan Sumber Permodalan Triwulan II 2024 - 2025

Perkiraan realisasi investasi pada triwulan II tahun 2025 terdiri dari PMA sebesar Rp1,67 Triliun dan PMDN sebesar Rp2,46 Triliun. Realisasi PMA diperkirakan tidak mengalami pertumbuhan dari periode periode yang sama tahun sebelumnya sebesar

Rp1,67 Triliun, sedangkan PMDN diperkirakan meningkat sebesar 10,02% dari periode yang sama tahun sebelumnya triwulan II tahun 2024 sebesar Rp2,23 Triliun.

Direktorat Pemberdayaan Usaha telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan sebesar Rp5.000.000.000,-. Dari pagu anggaran tersebut, terdapat blokir sebesar Rp4.614.654.000,- sehingga pagu anggaran efektif menjadi sebesar Rp385.346.000,-. Penyerapan anggaran sampai dengan pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar Rp90.728.225,- atau setara dengan 1,97% terhadap total pagu anggaran awal atau 23,54% terhadap pagu anggaran pasca blokir (pagu efektif).

Kegiatan dalam rangka peningkatan investasi usaha kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan pada triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Prasarana Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan.

Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan merupakan kawasan pemusatan dan pengelolaan usaha kelautan dan perikanan yang terintegrasi secara sistem bisnis perikanan meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran dalam rangka

hilirisasi hasil kelautan dan perikanan. Pada triwulan II tahun 2025, Direktorat Pemberdayaan Usaha melanjutkan penyusunan rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Hilirisasi Hasil Kelautan dan Perikanan. Judul rancangan Rancangan peraturan tersebut yang disepakati yaitu Kawasan Industri Hilirisasi Hasil Kelautan dan Perikanan.

Mengacu pada PP 20 Tahun 2024 tentang perwilayahan industri, Kawasan Industri Hilirisasi Hasil Kelautan dan Perikanan diharuskan menjadi kawasan industri dimana pelaku usaha KP didalamnya memiliki izin usaha industri yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian dan berlokasi di kawasan peruntukan industri. Saat ini, Kementerian Perindustrian sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri tentang Kawasan Industri Tematik Tertentu yang terdiri dari kawasan industri tematik hasil tembakau, hasil kelautan dan perikanan, tekstil dan pakaian jadi serta digital.

Direktorat Pemberdayaan Usaha tengah melakukan reformulasi ulang rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Industri Hilirisasi Hasil Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi KKP dalam pengelolaan kawasan industri tematik tertentu. Selain itu Direktorat Pemberdayaan

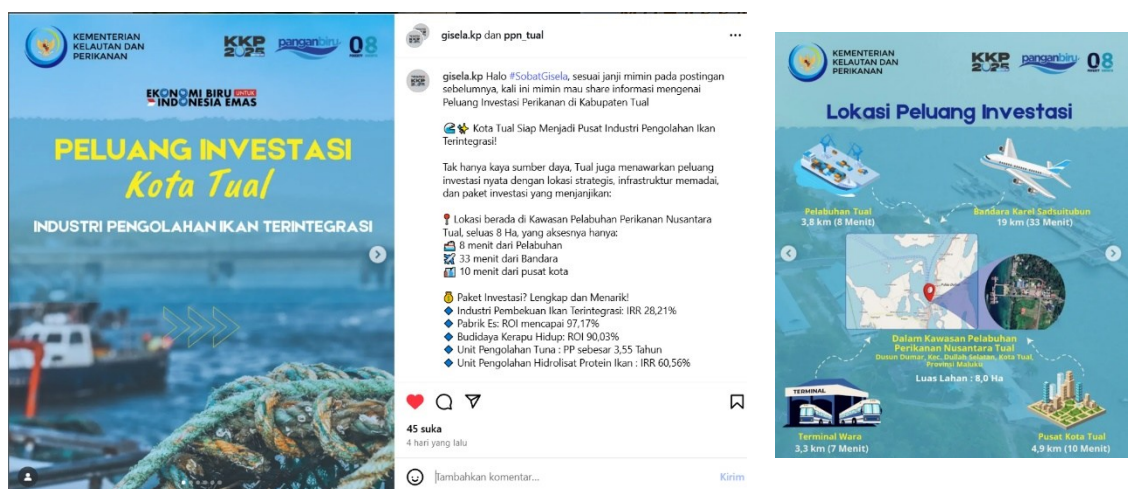
Usaha juga melakukan koordinasi dan sinergi kegiatan dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam rencana program Kawasan Industri Hilirisasi Hasil Kelautan dan Perikanan serta sinergitas kegiatan hilirisasi.

2. Promosi Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan potensi dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan berbasis komoditas unggulan pada suatu wilayah dalam rangka meningkatkan nilai investasi kelautan dan perikanan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode triwulan II antara lain :

a. Promosi Potensi dan Peluang Investasi Kota Tual melalui media sosial.

Kota Tual dikenal memiliki berbagai jenis ikan, seperti ikan tuna, cakalang, tongkol, dan ikan-ikan karang lainnya. Selain itu, sumber daya perikanan seperti udang, kepiting, dan rumput laut juga menjadi potensi ekonomi yang menjanjikan. Potensi tersebut tentunya menjadi peluang untuk berinvestasi pada industri pengolahan yang terintegrasi dengan usaha penangkapan sehingga menghasilkan produk perikanan yang bermutu dan bernilai tambah tinggi, serta mampu menembus pasar global. Promosi Potensi dan Peluang Investasi Kota Tual ini merupakan kegiatan mendukung kebijakan KKP dalam program Penangkapan Ikan Terukur di Zona 3. Peluang investasi yang ditawarkan tersebut meliputi industri pembekuan ikan, tuna loin, pengalengan, hidrolisat protein ikan (HPI), kerapu hidup, dan pabrik es.



Gambar 3. 3 Promosi Peluang Investasi Industri Pengolahan Ikan Terintegrasi Tuna di Tual, Maluku

b. Pendampingan Minat Investasi

1) Pendampingan dan Audiensi Minat Investasi Perikanan di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo

Audiensi dilaksanakan di Ruang Rapat Direktorat Pemberdayaan Usaha pada tanggal 23 April 2025, dipimpin oleh Direktur Pemberdayaan Usaha dengan dihadiri oleh Bupati Pohuwato, Kepala Dinas PUPR Kab. Pohuwato, Bapak Deni - Tenaga Ahli Wamen Desa, Bapak Siswanto – Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, dan Ibu Eva – Eksportir Hasil Perikanan dari Gorontalo. Bupati Pohuwato menyampaikan permohonan bantuan sarana dan prasarana pengolahan ikan dari Ditjen PDSPKP, seperti gudang beku. Selain itu, Bupati juga mengharapkan adanya percepatan proses perizinan berusaha, terutama perizinan bidang penangkapan ikan, untuk mendukung kemudahan perizinan dalam berinvestasi. Tenaga Ahli Wamen Desa mengharapkan adanya sinkronisasi bantuan dan kegiatan KKP pada Desa Tematik yang menjadi binaan Kemendes, seperti bantuan sarana prasarana, pendampingan investasi, dan pemberdayaan usaha masyarakat, serta tertarik untuk dapat berkontribusi pada program Modelling Penangkapan Ikan Terukur di Zona 3.

Salah satu peserta koordinasi, Ibu Eva yang merupakan eksportir ikan beku ke China, mengharapkan untuk dapat difasilitasi kemitraan usaha dengan penyedia ikan beku, serta tertarik melakukan investasi pada usaha penyimpanan ikan beku untuk jenis tertentu sesuai komoditas ekspornya, yakni layur, cumi dan sotong.

Sebagai tindak lanjut, Direktorat Pemberdayaa Usaha akan melakukan pendampingan rencana investasi dan kemitraan pelaku usaha pembekuan dari Pohuwato untuk usaha penyimpanan ikan beku, serta kemitraan dengan nelayan dan suplier ikan.



Gambar 3. 4 Pendampingan dan Audiensi Minat Investasi eksportir Ikan Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo

2) Pendampingan Minat Investasi PT Kenddo Fisheries Indonesia

PT Kenddo Fisheries Indonesia (KFI) merupakan salah satu investor yang didorong oleh JICA untuk mengoperasikan SKPT Saumlaki. Kegiatan audiensi dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2025 di Ruang Rapat Pemberdayaan Usaha GMB III Lantai 12, dihadiri oleh Mr. Kotaro Takahashi – CEO of Kenddo Management, Kenji Okamura – Senior Representative JICA Indonesia Office, Mr. Chikami – JICA Expert, serta Tim Ditjen PDSPKP yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Investasi, bersama Ketua Tim Kerja Pelayanan dan Kemitraan Usaha, Ketua Tim Kerja Pembiayaan dan perwakilan Direktorat Pengolahan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari peresmian SKPT Saumlaki pada bulan September 2024 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta Chief Representative of JICA, Ms Takeda. The Japan International Cooperation Agency (JICA) berkomitmen melanjutkan dukungan kepada KKP untuk menarik investor ke Saumlaki, terutama di PPI Ukurlaran, agar SKPT Saumlaki dapat dimanfaatkan secara optimal dan menyediakan peluang kerja bagi masyarakat sekitar.

Saat ini PT KFI akan melakukan penyusunan studi kelayakan ekspansi bisnis gurita, khususnya di wilayah Saumlaki, Banggai, Flores, Sumbawa, Moa dan Morotai. Sebagai langkah persiapan, PT KFI melakukan koordinasi dengan KKP dalam memperoleh dukungan data, informasi, dan sinergi kegiatan yang diperlukan dalam penyusunan studi kelayakan tersebut.



Gambar 3. 5 Pendampingan Investasi PT Kenddo Fisheries Indonesia

3) Pendampingan dan Audiensi Minat Investasi PT Pacific Blue Marlin

PT Pacific Blue Marlin adalah sebuah PMDN yang berkedudukan di Jakarta Utara, bergerak pada bidang penangkapan ikan, serta angkutan laut dalam dan luar negeri. PT Pacific Blue Marlin bermitra/joint venture dengan Zhuhai Hongwan Ocean Fisheries Co., Ltd dan Zhuhai GREE Group Co., Ltd. dari Tiongkok berdasarkan MoU yang ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2024 di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tiongkok. Rapat koordinasi dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025 di Ruang Rapat Palembang, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dipimpin oleh Direktur Hilirisasi Perikanan dan Kelautan - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan dihadiri oleh Commisioner PT Pacific Blue Marlin, Direktur China Ocean Group Development Ltd, Direktur Zhuhai Hongwan Ocean Fisheries Co., Ltd, Wakil Ketua China Optimization Society of Capital Construction, Ketua Kehormatan Fareast Credit Rating Co., Ltd, Wakil Dekan Institution of Fareast Credit Rating Co., Ltd., Ketua Orchid Hanfang Biotech Limited, serta perwakilan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Kementerian Kelautan dan Perikanan diwakili oleh Direktorat KAPI – DJPT, Direktorat Pemberdayaan usaha – DJPDS dan Direktorat Tata Ruang- DJPKRL.

Perusahaan JV tersebut berencana melakukan investasi senilai USD 460 juta atau sekitar Rp7 triliun berupa pengelolaan perikanan dan pembangunan kawasan industri perikanan di WPP 716, 717 dan 718, yang terdiri dari pembangunan wisata perikanan, pusat pelatihan, pabrik perbaikan kapal dan alat penangkapan ikan, pusat perdagangan ikan, logistik rantai dingin, unit pengolahan ikan, budidaya, penangkapan, pelabuhan perikanan, dan platform perdagangan ikan.

Sebanyak 300 kapal penangkapan ikan akan dikirimkan ke Indonesia secara bertahap untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan, serta 1 kapal kargo untuk mengangkut hasil olahan ikan yang dihasilkan dari kawasan indutri tersebut ke Tiongkok. PT Pacific Blue Marlin juga bermohon agar KKP dapat memberikan izin kepada mereka untuk melakukan ekspor ikan hidup dan melakukan ekspor langsung dari lokasi kawasan industri yang direncanakan akan dibangun di SKPT Saumlaki, atau dimungkin juga di lokasi lain, yakni Biak dan Sorong.

Saat ini PT Pacific Blue Marlin telah mulai melakukan usaha dengan mengusulkan pemanfaatan gudang beku di Saumlaki, Morotai dan Talaud, bermitra dengan nelayan lokal untuk pemenuhan bahan baku ikannya. Tim PT Pacific Blue Marlin juga sedang melakukan analisa kelayakan usaha, proses perizinan, dan menunggu ID Billing dari Kementerian Keuangan untuk pemanfaatan SKPT Saumlaki.

Sebagai tindak lanjut, Direktorat Pemberdayaan Usaha akan melakukan pendampingan kepada PT Pacific Blue Marlin dalam pengurusan kewajiban terkait kerjasama bilateral Indonesia RRT, serta realisasi investasi di bidang pengolahan dan pembekuan ikan.

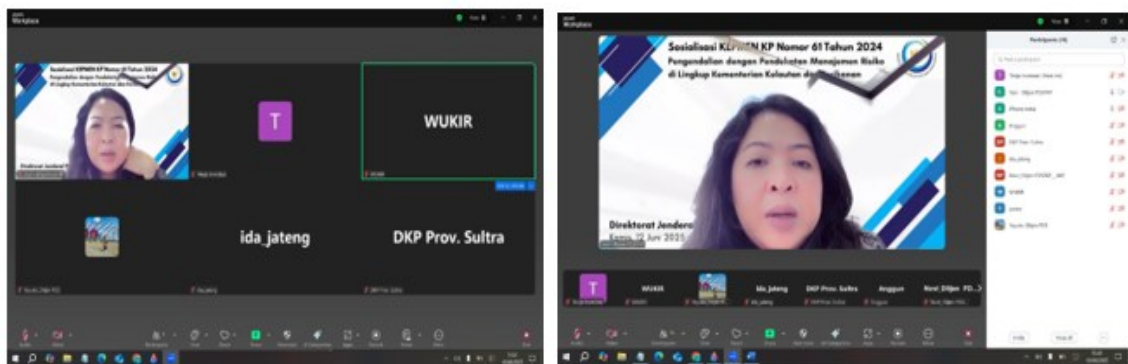


Gambar 3. 6 Pendampingan Investasi PT Pacific Blue Marlin

4) Pendampingan Investasi PT Lautan Sakti Jaya

PT. Lautan Sakti Jaya Indonesia merupakan pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan yang berasal dari penanaman modal asing (PMA) China dengan produk ikan dan udang beku yang berlokasi di Kendari dan Cilacap. Pendampingan investasi dengan PT. Lautan Sakti Jaya dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan Sulawesi Tenggara pada tanggal 16 Juni 2025 secara online. Berdasarkan data pada Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pada tahun 2020 PT. Lautan Sakti Jaya Indonesia yang berlokasi di Kendari dan Cilacap tercatat telah mengajukan rencana usaha sektor kelautan dan perikanan dengan kategori usaha baru atau perluasan. Namun, sampai dengan tahun 2024 belum terdapat realisasi investasi yang disampaikan pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Berdasarkan hasil koordinasi, PT Lautan Sakti Jaya Cilacap menyampaikan bahwa saat ini perusahaan telah beroperasi namun belum melakukan migrasi

izin berusaha pada OSS RBA dan melakukan pelaporan LKPM. Sedangkan PT Lautan Sakti Jaya Kendari telah melakukan migrasi izin berusaha pada OSS RBA dan pelaporan LKPM namun masih belum sesuai data rencana usaha. PT Lautan sakti Jaya akan segera melakukan perbaikan pelaporan LKPM dan migrasi melakukan migrasi izin berusaha pada OSS RBA. Sebagai tindak lanjut, Direktorat Pemberdayaan Usaha akan melakukan pendampingan kepada PT Lautan Sakti Jaya dalam pengisian LKPM dan pengurusan migrasi OSS RBA



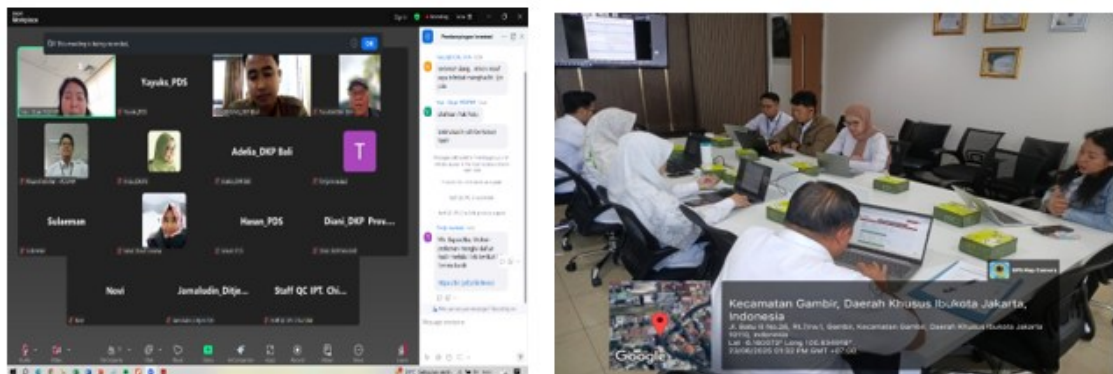
Gambar 3. 7 Pendampingan Investasi PT. Lautan Sakti Jaya

5) Pendampingan Minat Invetasi PT Industri Perikanan Terpadu Indonesia Chiu Shih

PT Industri Perikanan Terpadu Indonesia Chiu Shih merupakan pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan yang berasal dari penanaman modal asing (PMA) China dengan produk olahan Frozen Tuna, Frozen Pelagic, Frozen Shark Fin dan Fresh Tuna dengan tujuan negara Thailand, China, dan Taiwan yang berlokasi di Benoa Bali. Koordinasi pendampingan dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2025 secara online oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Berdasarkan data Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tahun 2020, PT Industri Perikanan Terpadu Indonesia Chiu Shih tercatat telah mengajukan rencana usaha sektor kelautan dan perikanan dengan kategori usaha baru atau perluasan. Sampai dengan tahun 2024 telah menyampaikan realisasi investasi pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) namun dengan nilai 0 (nol).

Berdasarkan hasil koordinasi, PT Industri Perikanan Terpadu Indonesia Chiu Shih menyampaikan bahwa saat ini perusahaan telah beroperasi namun tidak

memahami proses bisnis pelaporan realisasi investasi pada LKPM dan LKU, dan mereka menyambut baik pendampingan dan memohon pendampingan khusus untuk melakukan pelaporan usaha pelaporan LKPM dan LKU. Sebagai tindak lanjut, Direktorat Pemberdayaan Usaha akan melakukan pendampingan kepada PT Industri Perikanan Terpadu Indonesia Chiu Shih dalam pengisian LKPM dan LKU.



Gambar 3. 8 Pendampingan Investasi PT Industri Perikanan Terpadu Indonesia Chiu Shih

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp90.728.225,- atau setara dengan 23,54% dari total pagu efektif sebesar Rp385.346.000,-. Penggunaan anggaran pada triwulan II ini sangat efektif dimana capaian kegiatan mencapai 57,04% dengan menggunakan anggaran baru 23,54%.

IK2. Jumlah Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan Dan Pemasaran Yang Diterbitkan

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) terus berupaya mendorong peningkatan realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai program strategis, yang memudahkan para investor untuk berusaha di sektor kelautan dan perikanan antara lain: Layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha pengolahan ikan untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya untuk mendapatkan legalitas perizinan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Indikator ini dicapai melalui kegiatan budaya pelayanan prima, penerapan

standar pelayanan, penyelesaian hambatan perizinan, pengelolaan pengaduan dan survey kepuasan masyarakat.

Dalam rangka mencapai target tersebut, Ditjen PDSPKP terus berupaya mendorong peningkatan realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai kegiatan strategis, sebagai indikator kinerja Layanan Perizinan Usaha Pengolahan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Capaian kinerja ini belum dapat dihitung pada Triwulan II, hal ini dikarenakan penilaian terhadap layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha KP baru dapat dilakukan pada akhir tahun.

Tabel 4 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan Dan Pemasaran Yang Diterbitkan Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW II terhadap target 2025
	TW II 2025	TW IV 2024	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW IV 2024	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW IV 2024	TW II 2024	
Jumlah perizinan berusaha sub sektor pengolahan dan pemasaran yang diterbitkan (sertifikat)	20	-	-	50	34	-	-	34	170	-	-	68

Realisasi penerbitan sertifikat standar pada Triwulan II Tahun 2025 mencapai 17 Sertifikat Standar, yakni tercapai 100% jika dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2025 sebesar 17 sertifikat, Jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya yaitu triwulan 1 tahun 2024 sebesar 21 sertifikat maka capaian ini mengalami peningkatan sebesar 81 %.



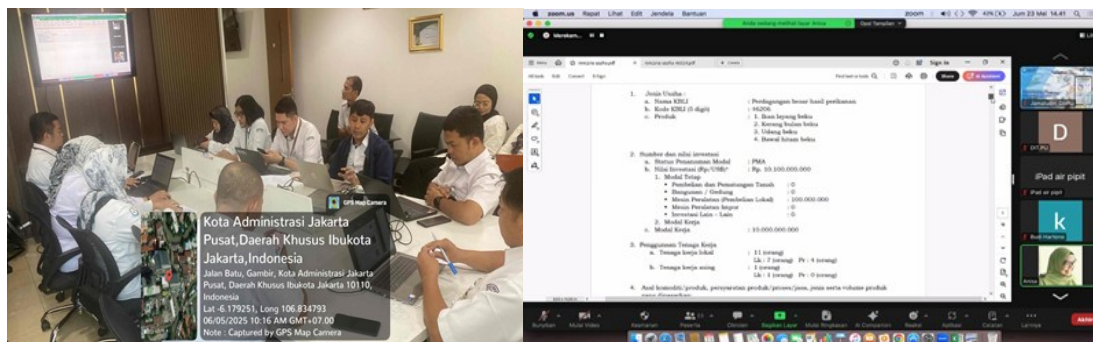
Gambar 3. 9 Jumlah Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran yang diterbitkan

Kegiatan Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan dan Pemasaran bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2025, meliputi:

1. Implementasi pelayanan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan.

Kegiatan verifikasi kelengkapan standar berusaha pengolahan dan pemasaran selama periode Triwulan II 2025, telah dilaksanakan 3 (tiga) kali rapat verifikasi. Pertemuan ini bertujuan dalam rangka membahas kelengkapan komitmen, rencana usaha dan permohonan penerbitan standar usaha. Pertemuan dihadiri oleh tim verifikasi yang beranggotakan: Pusat Data, Statistik, dan Informasi - Setjen, Bagian Hukum - Setditjen PDSPKP, Direktorat Pengolahan, Direktorat Logistik, Direktorat Pemasaran, BBP3KP, serta Koordinator kelompok lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP pada tanggal 15 April, 23 Mei dan 5 Juni 2025 di ruang rapat Direktorat Pemberdayaan Usaha, serta melalui *video conference*. Adapun Selama periode April - Juni 2025 telah diterbitkan 17 Sertifikat Standar Pengolahan dan Pemasaran Ikan kepada 14 pelaku usaha (PT. Seafodo Food International, PT. Samudra Mas Group, PT. Cahaya Laut Abadi, PT. Dunia Hijau, PT. Bumi Laut Pertiwi, PT. Nihon Novelica Food, PT. Nusavin Aquaculture International, Phillips Seafood Indonesia, PT. Plant Pasuruan, PT. Hasil Indo Sejahtera) yang bermohon dengan rincian 6 (enam) Sertifikat Standar Subsektor Pengolahan Ikan dan 11 (sebelas) Sertifikat Standar Subsektor Pemasaran Ikan yang sesuai dengan ketentuan Permen KP No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan, dimana pelaku usaha tersebut harus memenuhi standar usaha yang telah ditetapkan.





Gambar 3. 10 Implementasi pelayanan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan

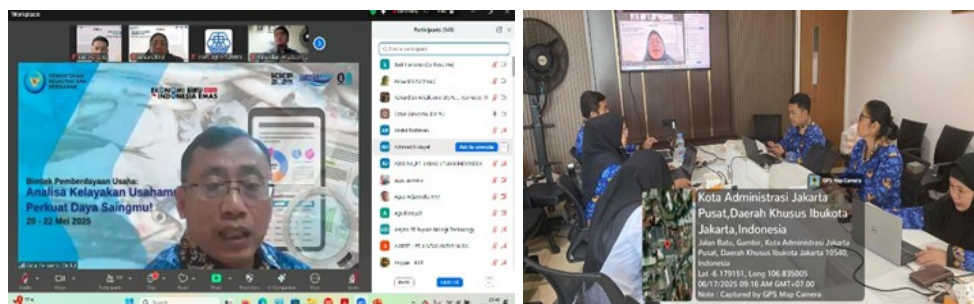
2. Sosialisasi Monitoring Pelaporan Kegiatan Usaha

Dalam rangka meningkatkan pemahaman kepada pelaku usaha terkait Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan, Pemasaran dan Jasa Pasca Panen, telah dilaksanakan Webinar pada tanggal 17 Juni 2025. Pembukaan oleh Direktur Pemberdayaan usaha yang diwakili Indah Koesharyanti Katimja Pembiayaan.

Pembahasan terkait sosialisasi Monitoring Pelaporan Kegiatan Usaha Paparan teknis pengisian Laporan Kegiatan Usaha, dengan Peserta Rapat; Sesditjen PDSPKP, Katimja PTSA KKP, DKP Bali, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepri, Lampung, Maluku, NTB, NTT, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan para pelaku usaha subsektor pengolahan. Adapun materi yang disampaikan yaitu pertama, Pembahasan Monitoring Pelaporan Kegiatan Usaha dimana menjelaskan monitoring pelaporan kegiatan usaha perlu dilakukan secara sistematis untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha, dan pemerintah perlu memantau laporan kegiatan usaha yang disampaikan oleh pelaku usaha. Kedua, Evaluasi Kepatuhan Pelaku Usaha dimana menjelaskan evaluasi kepatuhan pelaku usaha perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku dan pemerintah juga perlu memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan.

Selama berlangsungnya kegiatan tersebut, banyak sekali pertanyaan dan diskusi yang disampaikan oleh peserta sosialisasi khususnya terkait teknis penginputan pada form Laporan Kegiatan Usaha. Adapun tindak lanjut dari sosialisasi tersebut antara lain :

1. Monitoring pelaporan kegiatan usaha perlu dilakukan secara sistematis untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha.
2. Evaluasi kepatuhan pelaku usaha perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku.
3. Menindaklanjuti hasil monitoring pelaporan kegiatan usaha dan evaluasi kepatuhan pelaku usaha.
4. Memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan.
5. Selalu mendapatkan update terkait tata cara dan persyaratan perijinan berusaha
6. Meningkatkan intensitas pendampingan kepada pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan usaha secara berkala.



Gambar 3. 11 Sosialisasi Kebijakan Perizinan Berusaha Sektor KP

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp26.889.251,- atau setara dengan 52,22% dari total pagu efektif sebesar Rp51.492.000,-. Penggunaan anggaran pada triwulan II ini sangat efektif dimana capaian kegiatan mencapai 68% dengan menggunakan anggaran baru 52,22%.

3.2.2. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya omset UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan

IK3. Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan Yang Meningkat Omsetnya

Potensi UMKM kelautan dan perikanan masih sangat terbuka luas untuk dikembangkan. Namun upaya pengembangan UMKM kerap dihadapkan pada berbagai permasalahan salah satunya adalah aspek finansial dalam hal ini peningkatan omset. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM kelautan dan perikanan

diperlukan strategi pemberdayaan yang berpihak kepada UMKM dan menjadi solusi dalam berbagai permasalahan yang dihadapi dengan melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan omsetnya.

Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Omsetnya dalam rangka mendorong tumbuhnya UMKM untuk meningkat omsetnya pasca pembinaan dan pendampingan. Pada Tahun 2025 ditargetkan sebanyak 5%

$$\Sigma n \% = (\Sigma n1 / \Sigma n2) \times 100\%$$

$\Sigma n \%$ = Persentase peningkatan omset UMKM Pengolahan Produk KP

$\Sigma n1$ = Jumlah UMKM yang meningkat omsetnya

$\Sigma n2$ = Jumlah UMKM yang dibina

UMKM yang meningkat omsetnya dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 5 Ikhtisar Pencapaian Indikator Persentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan yang meningkat omsetnya Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW II terhadap target 2025
	TW II 2025	TW IV 2024	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW IV 2024	TW II 2024	Sd. Tahun 2025	TW II 2025	TW IV 2024	TW II 2024	
Persentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan yang meningkat omsetnya (Persen)	1	-	-	5	1,5	-	-	1,5	150	-	-	30

Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Omsetnya merupakan persentase jumlah UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang meningkat omsetnya pasca pembinaan dan pendampingan menuju UMKM Naik Kelas dibandingkan dengan Jumlah UMKM yang dibina. Presentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan naik kelas sebesar 1,5% dari 661 UMKM terkurasi atau sejumlah 10 UMKM sesuai dengan target Triwulan II tahun 2025. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 5% maka realisasi presentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan naik kelas mencapai 30%.

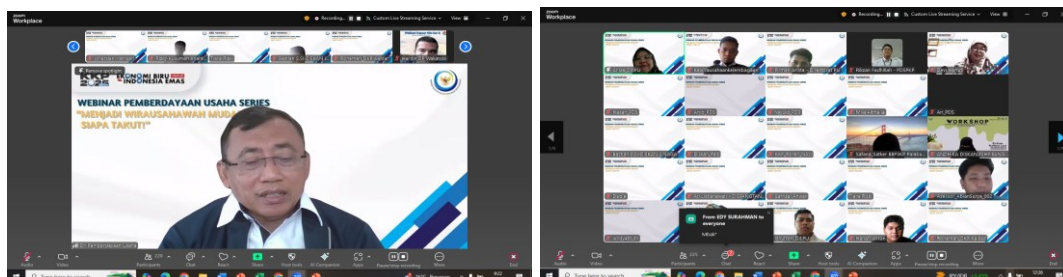
Usaha mikro, kecil dan menengah bidang pengolahan produk kelautan dan perikanan yang meningkat kelasnya dihitung berdasarkan 6 aspek usaha (legalitas, sumber daya manusia, produksi, keuangan, pemasaran, operasional)

Untuk mendukung capaian tersebut, kegiatan penumbuhan dan pembinaan wirausaha hasil kelautan dan Perikanan yang telah dilakukan pada triwulan II 2025, meliputi:

A. Pembinaan dan Pendampingan Wirausaha KP

Kegiatan pembinaan dan pendampingan wirausaha KP dilaksanakan pada tanggal 18 dan 19 Juni 2025 dengan tema Webinar Pemberdayaan Usaha Series. Kegiatan tersebut mengundang wirausaha sektor kp yang eksisting, wirausaha baru sektor kp, serta Dinas Kelautan dan Perikanan daerah secara daring.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui proses bisnis wirausaha sektor kelautan dan perikanan baik yang sudah ekisting maupun wirausaha baru sehingga dapat ditentukan aspek yang akan dibina untuk meningkatkan omsetnya. Pada triwulan II tahun 2025 output dari kegiatan pembinaan dan pendampingan wirausaha hasil KP sebanyak 250 wirausaha sektor kp.



Gambar 3. 12 Kegiatan pembinaan dan pendampingan wirausaha KP

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp118.721.654,- atau setara dengan 11,51% dari total pagu sebesar Rp1.031.156.000,-. Penggunaan anggaran pada triwulan II ini lebih difokuskan pada kegiatan rapat koordinasi dengan instansi terkait dan kegiatan identifikasi. Penggunaan anggaran pada triwulan II ini sangat efektif dimana capaian kegiatan mencapai 30% dengan penggunaan anggaran sebesar 11,51%.

IK4. Persentase Peningkatan Kinerja Lembaga Usaha Sektor Kelautan Dan Perikanan

Fasilitasi pengembangan kelembagaan merupakan titik awal untuk membangun ekosistem usaha dalam mendorong pengembangan dan keberlanjutan usaha yang berdaya saing. Upaya yang dilakukan yaitu dengan memperkuat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaku usaha agar mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya dan meningkatkan posisi tawar sehingga dapat meningkatkan skala usaha dan kesejahteraan pelaku usaha. Sasaran pengembangan kelembagaan usaha adalah pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan. Target dari kegiatan fasilitasi pengembangan kelembagaan usaha adalah transformasi kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan yang mandiri dan berkelanjutan.

Pada tahun 2025 fasilitasi pengembangan kelembagaan dilakukan melalui: penyadartahuan pelaku usaha terhadap status lembaga usaha berbadan hukum, fasilitasi pembentukan lembaga usaha berbadan hukum, identifikasi pelaku usaha yang berpotensi ditingkatkan kapasitas kelembagaan usahanya, perumusan model kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan yang sesuai di kawasan pengembangan, penguatan kelembagaan usaha melalui serangkaian kegiatan pendampingan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan kelembagaan usaha berbasis korporasi, fasilitasi perluasan akses pasar dan kemitraan dengan pelaku usaha/lembaga usaha lain serta monitoring dan evaluasi kinerja lembaga usaha untuk dapat diketahui peningkatan kinerjanya. Untuk mengetahui peningkatan kinerja lembaga usaha, telah dilakukan evaluasi kinerja awal melalui pendataan kepada unit koperasi terpilih yang kemudian akan dibanding dengan hasil evaluasi kinerja di akhir tahun.

Kegiatan fasilitasi pengembangan kelembagaan tahun 2025 merupakan bagian dari upaya strategis Direktorat Pemberdayaan Usaha untuk mendukung penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dengan target capaian ditetapkan sebanyak 22 lembaga dan target capaian peningkatan kinerja lembaga usaha sektor kelautan dan perikanan sebesar 6% yang akan disampaikan pada akhir tahun anggaran. Jumlah fasilitasi pengembangan kelembagaan yang telah dilakukan pada triwulan II tahun 2025 telah mencapai 1 lembaga usaha, dengan total capaian keseluruhan sejak triwulan I adalah 3 lembaga usaha yaitu telah mencapai 100%.

Tabel 6 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan kinerja lembaga usaha sektor kelautan dan perikanan Triwulan II 2025

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW II terhadap target 2025
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	
Persentase peningkatan kinerja lembaga usaha sektor kelautan dan perikanan (Persen)												

Pada triwulan II, telah dilakukan beberapa kegiatan, antara lain:

1) Sosialisasi Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada tanggal 24 April 2025

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Instruksi Presiden dimaksud pada tanggal 24 April 2025. Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ditargetkan terbentuk sebanyak 80.000 unit di seluruh desa/kelurahan di Indonesia.

Sosialisasi Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dipimpin oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan dan dihadiri secara *hybrid* yaitu *offline* dihadiri oleh perwakilan eselon I dan II lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan secara *online* sebanyak 3.415 peserta terdiri dari penyuluh perikanan dan pengurus koperasi kelautan dan perikanan.

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilakukan dengan tiga model pendekatan didahului dengan musyawarah desa khusus, menyesuaikan kondisi masing-masing wilayah, yaitu:

1. Pembentukan koperasi baru, dilaksanakan di desa-desa yang belum memiliki koperasi. Model ini membentuk koperasi dari nol dengan menghimpun anggota baru, modal awal, dan merintis unit usaha sesuai potensi desa;
2. Pengembangan koperasi yang sudah ada, diterapkan pada desa yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja cukup baik; dan
3. Revitalisasi koperasi, dilakukan pada koperasi desa yang sudah ada namun tidak aktif/ lemah.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melakukan usaha wajib:

1. Penyediaan kantor koperasi
2. Gerai/ outlet penyediaan sembako;
3. Gerai/outlet penyediaan obat murah/apotek;
4. Unit simpan pinjam koperasi;
5. Gerai/outlet klinik desa;
6. Penyediaan *cold storage* atau gudang;
7. Logistik (distribusi);
8. dan lain-lain sesuai penugasan, kebutuhan dan potensi desa.

Dalam Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dibentuk Satgas Nasional dengan pembagian wilayah sebagai berikut:

1. Kementerian Pertanian sebagai koordinator wilayah I di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur;
2. Kementerian Dalam Negeri sebagai koordinator wilayah II di Provinsi Jawa Barat, Aceh, Lampung, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan dan Jambi;
3. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai koordinator wilayah III di Provinsi Jakarta, Banten, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan; dan
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai koordinator wilayah IV di Provinsi Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT.

Koperasi yang bergerak di usaha kelautan dan perikanan akan hadir dalam musyawarah desa khusus untuk dapat memutuskan apakah dapat bertransformasi ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau menjadi bagian unit bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dalam pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih, penyuluh perikanan berperan tidak hanya sebagai pendamping teknis, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari bawah, mengawal proses kelembagaan, dan mendampingi masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.



Gambar 3. 13 Sosialisasi Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada tanggal 24 April 2025

2) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Jawa Timur pada tanggal 30 April 2025

Dalam kunjungan ini terdapat pelaksanaan dua kegiatan, yaitu peninjauan ke Koperasi Binaan KKP serta peluncuran dan dialog musyawarah desa/kelurahan khusus dalam rangka percepatan pembentukan Kopdeskel Merah Putih di Provinsi Jawa Timur.

Koperasi Sumber Mulyo 5758 berlokasi di Dusun Tanjungsari, Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo merupakan koperasi binaan KKP yang dikunjungi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan dan Wakil Menteri BUMN untuk melihat seluruh aktivitas usaha koperasi dari mulai dari budidaya rumput laut, penanganan, dan pengemasan dan penjualan rumput laut kering.

Koperasi Sumber Mulyo 5758 merupakan salah satu koperasi binaan KKP yang berdiri sejak tahun 2018. Koperasi ini memiliki anggota sebanyak 54 orang yang berprofesi sebagai petambak dan pengeringan rumput laut, dengan luas lahan konsolidasi mencapai 400 hektar. Volume produksi rumput laut kering jenis *Gracilaria* sp. mencapai 4.800 ton per tahun, dengan nilai produksi mencapai Rp. 30,7 Milyar. Koperasi Sumber Mulyo 5758 telah memasarkan rumput laut kering untuk kebutuhan pasar lokal ke pabrik agar yaitu PT. Surya Indoalgas, dan pasar ekspor ke China dan Vietnam melalui eksportir.

Sebagai bentuk dukungan KKP, telah dilakukan penguatan Koperasi Sumber Mulyo 5758 pada tahun 2019 dengan diberikan bantuan berupa gudang rumput laut berkapasitas 500 ton. Selain itu, Kabupaten Sidoarjo ditetapkan sebagai kampung perikanan budidaya (KPB) rumput laut melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 111 tahun 2023 tentang Kampung Perikanan Budidaya, dengan salah satu lokusnya adalah Desa Kupang. Dalam rangka penguatan KPB tersebut, KKP telah menyalurkan bantuan sarana produksi budidaya berupa kendaraan roda tiga, benih ikan bandeng, pompa air, dan pakan mandiri pada tahun 2023. Untuk pendampingan di lapangan terkait dengan akses teknologi, informasi, pasar dan lembaga permodalan telah dilakukan oleh penyuluh perikanan yang ada di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 19 orang. Koperasi Sumber Mulyo 5758 dapat bertransformasi menjadi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan/atau menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dengan menambah unit bisnis pokok seperti apotek, klinik desa, sembako, unit simpan pinjam, distribusi dan kantor koperasi sehingga dapat melayani seluruh kebutuhan dasar masyarakat Desa Kupang.

Selain mengunjungi Koperasi Sumber Mulyo 5758, juga dilakukan peninjauan Pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (musyawarah desa/kelurahan khusus) Desa Kupang yang dipimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa dan dihadiri sekitar 120 orang yang terdiri dari perangkat desa, tokoh desa, pembudidaya rumput laut, nelayan, penyuluh perikanan, pendamping desa dan masyarakat desa. Dari hasil musyawarah desa/kelurahan khusus disepakati pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kupang sebagai *holding*/multi pihak dan Koperasi Sumber Mulyo 5758 menjadi anggota dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kupang tersebut.

Pelaksanaan peluncuran dan dialog percepatan musyawarah desa/kelurahan khusus pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih berlokasi di Gedung Jatim Expo - Surabaya dan diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hadir dalam acara peluncuran yaitu Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri dan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Wakil Menteri BUMN, Wakil Gubernur Jawa Timur, Forkopimda Jawa Timur, bupati dan wali kota se-Jawa Timur, serta kepala desa dan lurah se-Jawa Timur.

Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan musyawarah desa/kelurahan khusus dan telah diputuskan pembentukan koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebanyak 1.247 unit yang terdiri dari 1.166 unit koperasi desa dan 81 unit koperasi kelurahan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan kesiapannya untuk menyediakan anggaran pendirian legalitas dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan telah menggandeng perwakilan notaris di Jawa Timur untuk mendukung percepatan legalisasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.



Gambar 3. 14 Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Jawa Timur pada tanggal 30 April 2025

3) Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih di Kabupaten Pandeglang, Banten pada tanggal 7 Mei 2025

Peluncuran dan dialog percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih bertempat di Desa Kertasana, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan,

Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Agenda kegiatan adalah 1) Penganjangan Desa Ekspor Ikan Mas Koki Binaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Karya Bersama bekerjasama dengan PT. Limas Inti Makmur sebagai offtaker; 2) Pelaksanaan Program Gerakan Indonesia Menanam (Pengembangan Budidaya Padi); dan 3) Peluncuran Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (musyawarah desa/kelurahan khusus) Pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih di Balai Desa Kertasana.

Dalam kegiatan ini ditekankan bahwa kepala desa beserta BPD agar melaksanakan musyawarah desa/kelurahan khusus untuk pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih. Koperasi desa/kelurahan merah putih diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi desa dan mendekatkan pelayanan pemerintah kepada warga desa. Koperasi desa/kelurahan merah putih akan diberikan fasilitas dana pinjaman dengan plafon sekitar lima milyar rupiah dan bunga rendah untuk modal menjalankan aktivitas usahanya.



Gambar 3. 15 Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih di Kabupaten Pandeglang, Banten pada tanggal 7 Mei 2025

4) Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 6 Mei 2025

Dalam kunjungan ini terdapat pelaksanaan dua kegiatan, yaitu peninjauan ke kelompok usaha perikanan serta peluncuran dan dialog musyawarah desa/kelurahan khusus dalam rangka percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih di Provinsi Jawa Timur.

Kelompok Pembudidaya Ikan Mina Lestari didirikan tahun 2023 dengan komoditas budidaya ikan Lele dan Nila yang menghasilkan 2 – 4 ton dalam 1 siklus. Arahana Wamen

Kelautan dan Perikanan, Kelompok Pembudidaya Ikan Mina Lestari agar mengikuti musyawarah desa/kelurahan khusus agar bisnis budidaya menjadi bagian dalam unit bisnis Desa Kebumen dan penyuluh untuk terus mendampingi kelompok usaha kelautan dan perikanan.

Kunjungan ke Kelompok Pengolah Pemasar Sido Makmur yang merupakan kelompok pengolah ikan krispi dengan merk 'Iwakoe'. Kelompok Pengolah Pemasar Sido Makmur telah memasarkan produknya ke toko oleh-oleh di Yogyakarta dan Semarang. Dengan produksi rata-rata 800 kg sampai 2 ton per bulan. Poklamsar telah menerima bantuan dari Dirjen PDSPKP berupa bedah/rehab UPI tahun 2023 dan telah memiliki SKP. Kelompok Pengolah Pemasar Sido Makmur diminta agar bergabung dalam koperasi desa/kelurahan merah putih.

Musyawarah desa/kelurahan khusus di Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru dihadiri oleh 125 anggota masyarakat yang terdiri dari perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, pemuka dan tokoh masyarakat, penyuluh perikanan dan masyarakat Desa Kebumen. Masyarakat desa diminta untuk dapat menyepakati pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih dan memilih unit bisnis yang dapat membantu mengembangkan usaha koperasi, Selain itu penyuluh di lapangan diminta untuk dapat melakukan pendampingan secara aktif.

Pelaksanaan peluncuran dan dialog percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri dan Wakil Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Menteri Koperasi, Wakil Menteri Pertanian, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati/Walikota serta Lurah/Kepala Desa seluruh Jawa Tengah. Gubernur melaporkan pelaksanaan musyawarah desa/kelurahan khusus dalam rangka pembentukan koperasi desa Merah putih di Jawa Tengah telah mencapai 1.066 desa/kelurahan dari sebanyak 8.464 desa/kelurahan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melakukan pembinaan dan pendampingan bagi koperasi desa/kelurahan merah putih yang memiliki bisnis perikanan di desa yang memiliki potensi perikanan.



Gambar 3. 16 Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 6 Mei 2025

5) Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 15 Mei 2025

Dalam kunjungan ini terdapat pelaksanaan dua kegiatan, yaitu peninjauan musyawarah desa/kelurahan khusus serta peluncuran dan dialog musyawarah desa/kelurahan khusus dalam rangka percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih di Provinsi Jawa Barat.

Peninjauan musyawarah desa/kelurahan khusus dilakukan di Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung untuk melihat proses pelaksanaan musyawarah desa/kelurahan khusus dan aktivitas bisnis yang sedang dikembangkan oleh masyarakat di kelurahan Jati Sari. Kota Bandung ditargetkan akan membentuk koperasi desa/kelurahan merah putih sebanyak 150 unit dan diharapkan koperasi ini mampu meningkatkan produktivitas dan peningkatan ekonomi masyarakat Kota Bandung.

Masyarakat Kelurahan Jatisari memiliki bisnis center yang mengembangkan usaha pertanian, perikanan (budi daya ikan dalam ember) dan penjualan pangan olahan. Bisnis center kedepannya dapat dikembangkan dengan menambah 7 unit bisnis wajib yang ada di koperasi desa/kelurahan merah putih.

Pelaksanaan Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan dilaksanakan di Hall Stadion Jalak Harupat dihadiri sekitar dari 6.000 peserta secara hybrid, terdiri atas Lurah/Kepala Desa, Camat, Bupati/Walikota se-Jawa Barat, serta perwakilan berbagai Kementerian/Lembaga. Jumlah desa/kelurahan di wilayah Jawa Barat yang telah melaksanakan musyawarah desa/kelurahan khusus sebanyak 2.058 desa/kelurahan, dan sebanyak 3.648 desa/kelurahan yang belum melaksanakan musyawarah desa/kelurahan khusus.



Gambar 3. 17 Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 15 Mei 2025

6) Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 21-22 Mei 2025

Rangkaian acara berupa kunjungan ke Kelompok Budi Daya Ikan Datu Mangku-Kelurahan Kereng Bingkirei Kota Palangkaraya, serta Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kelompok Budi Daya Ikan Datu Mangku memiliki pembesaran dan wisata pemancingan dengan produksi mencapai 2 ton/bulan untuk memenuhi restoran dan kolam pemancingan. Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Kelurahan Kereng Bingkirei, dan diarahkan untuk segera melaksanakan musyawarah desa/kelurahan khusus dengan target 31 Mei 2025.

Peluncuran dan dialog Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh Menko Pangan, dan dihadiri Kepala Badan Pangan, Perwakilan Eselon 1 K/L, Kapolda, Kodam, Kajati, serta hadir 4.000 Kepala Desa/Lurah, Camat seluruh Provinsi Kalimantan Tengah. Pada pelaksanaan peluncuran dilakukan pengurusan calon Koperasi Desa Merah Putih secara serentak untuk wilayah Kota Palangkaraya sehingga langsung terbentuk Koperasi Desa Merah Putih 100% (68 kelurahan).



Gambar 3. 18 Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 21-22 Mei 2025 pada tanggal 21-22 Mei 2025

7) Persiapan Koperasi Desa Merah Putih Pangkahwetan menjadi calon *mock up*/percontohan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di sektor perikanan pada tanggal 26 Mei 2025

Kunjungan dilaksanakan dalam rangka persiapan Koperasi Desa Merah Putih Pangkahwetan menjadi calon *mock up*/percontohan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di sektor perikanan. Koperasi Desa Merah Putih Pangkahwetan harus terdapat unit usaha wajib yang telah ditentukan dalam Instruksi Presiden (Inpres), termasuk mengelola gas subsidi, pupuk subsidi dll. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menentukan unit usaha tambahan sesuai dengan potensi desa, Desa Pangkah Wetan bisa mengoptimalkan perikanan (tambak bandeng, udang, kepiting dan rumput laut) dan juga pertanian.

Penyuluh Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk melakukan pendampingan ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terkait manajemen usaha, keuangan dan pendampingan lainnya. Untuk usaha gudang/*cold storage* sebaiknya tidak membangun yang baru, namun dapat memanfaatkan dan/atau memperbaiki aset-aset yang tidak digunakan.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat bekerja sama dengan koperasi *existing* atau dapat bergabung menjadi bagian unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.



Gambar 3. 19 Pendampingan Kunker Wamen KP di Desa Pangkahwetan Kabupaten Gresik pada tanggal 26 Mei 2025

8) Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung pada tanggal 27-28 Mei 2025

Kegiatan dihadiri oleh Kepala Badan Pangan Nasional, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Gubernur masing-masing provinsi dan Bupati/Wali Kota, perwakilan Eselon 1 lingkup K/L, Satgas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih KKP (Direktur Pemberdayaan Usaha-Ditjen PDSPKP, Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan-DJPT, Direktur Prasarana dan Sarana-Ditjen Budidaya, dan Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan-BPPSDMKP, serta Kepala Desa/Lurah di masing-masing provinsi.

Pada kegiatan peluncuran dan dialog di Provinsi Sumatera Selatan diarahkan untuk mendorong percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan uji coba penerbitan badan hukum sebanyak 10 dokumen oleh AHU dan percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus di Kota Palembang sebanyak 100%.

Kegiatan peluncuran dan dialog KDMP di Provinsi Lampung dilaksanakan pada 28 Mei 2025 dengan kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan untuk melihat percontohan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk. Adapun unit usahanya adalah toko sembako yang menyediakan beras, minyak, gula, distributor pupuk pertanian, agen gas elpiji dan agen BRlink, serta agen Pos Indonesia. Cikal bakal Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah gabungan kelompok tani dan menjadi *modelling* KDMP pertama di Indonesia. Peluncuran dan dialog dihadiri oleh Bupati/Wali Kota, serta Kepala Desa/Lurah dan BPD.



Gambar 3. 20 Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung pada tanggal 27-28 Mei 2025

9) Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 2-3 Juni 2025

Koperasi Desa Merah Putih Syariah Bilelendo yang berlokasi di Kecamatan Seraya Timur Kabupaten Lombok Tengah adalah salah satu koperasi desa/kelurahan merah putih yang memiliki unit usaha sektor kelautan dan perikanan berbasis syariah. Koperasi ini memiliki potensi besar untuk menjadi model percontohan bagi pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah Putih di wilayah lainnya, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. koperasi desa/kelurahan Merah Putih ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa, mengonsolidasikan pelaku usaha perikanan skala kecil, serta mendistribusikan kebutuhan pokok secara efisien dan berkeadilan bagi masyarakat desa pesisir.

Unit Usaha yang terdapat dalam Koperasi Desa Merah Putih Syariah Bilelendo antara lain:

- a. Unit Usaha Sembako yang bekerja sama dengan Perum Bulog;
- b. Unit Usaha Layanan Transaksi Keuangan Brilink yang bekerja sama dengan BRI;
- c. Unit Usaha Layanan Kesehatan yang bekerja sama dengan Poliklinik Desa;
- d. Unit Usaha Gudang yang akan memanfaatkan gudang pengemasan garam milik desa;
- e. Unit Usaha Budidaya ikan berupa udang vanamei dan ikan nila
- f. Unit Usaha Logistik yang bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia
- g. Unit Usaha Garam

Pada saat peluncuran Mock Up Koperasi Desa Merah Putih Syariah Bilelendo pada tanggal 2 Juni 2025, juga dilakukan:

- a. Penandatanganan MoU kerja sama antara Koperasi Desa Merah Putih Syariah Bilelendo dengan PT Pos Indonesia;
- b. Penandatanganan MoU kerja sama antara Koperasi Desa Merah Putih Syariah Bilelendo dengan Bank BRI;
- c. Penandatanganan MoU kerja sama antara Koperasi Desa Merah Putih Syariah Bilelendo dengan Perum Bulog;
- d. Penyerahan dokumen Akta Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Syariah Bilelendo; dan
- e. Penyerahan dokumen Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi Desa Merah Putih Syariah Bilelendo

Selain peluncuran mock up Koperasi Desa Merah Putih Syariah Bilelendo, juga dilakukan peluncuran mock up Koperasi Desa Merah Putih Kekerri yang berlokasi di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 3 Juni 2025.

Unit usaha yang terdapat Koperasi Desa Merah Putih Kekerri antara lain:

- a. Unit Usaha Sembako yang bekerja sama dengan Perum Bulog;
- b. Unit Usaha Layanan Transaksi Keuangan Brilink yang bekerja sama dengan BRI;
- c. Unit Usaha Apotek dan Klinik milik desa;
- d. Unit Usaha Gudang;
- e. Unit Usaha Logistik yang bekerja sama dengan PT Pos Indonesia; dan
- f. Unit Usaha Simpan Pinjam.

Selain Peluncuran Mock Up Koperasi Desa Merah Putih Kekerri, juga dilakukan:

- a. Penandatanganan MoU kerja sama antara Koperasi Desa Merah Putih Kekerri dengan PT Pos Indonesia;
- b. Penandatanganan MoU kerja sama antara Koperasi Desa Merah Putih Kekerri dengan Bank BRI;
- c. Penandatanganan MoU kerja sama antara Koperasi Desa Merah Putih Kekerri dengan PT Bulog;
- d. Penyerahan dokumen Akta Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Kekerri; dan
- e. Penyerahan dokumen Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi Desa Merah Putih Kekerri

Setelah melakukan kegiatan peluncuran mock up koperasi desa merah putih, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan juga menghadiri Peluncuran dan Dialog

Percepatan Pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel Merah Putih) di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang diselenggarakan di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Kota Mataram.

Peluncuran program secara resmi ditandai dengan pemukulan Gendang Beleg oleh Wakil Menteri Koperasi dan UKM, bersama Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan dan Gubernur NTB. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Forkopimda NTB, kepala daerah se-Provinsi NTB, perwakilan kementerian/lembaga yang tergabung dalam Satgas Percepatan Kopdes Merah Putih, serta tokoh masyarakat dan undangan lainnya.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dibentuk akan menjalankan tujuh unit usaha utama, yaitu Kantor Koperasi, Kios Sembako, Unit Simpan Pinjam, Klinik Kesehatan, Apotek, Cold Storage, dan Sistem Logistik Desa/Kelurahan. Ketujuh unit tersebut dirancang untuk mendorong pelayanan dasar masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak dan rentenir, serta memperkuat kemandirian ekonomi lokal.

Gubernur NTB mengapresiasi pemerintah pusat atas dukungan yang diberikan, serta menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung percepatan program, termasuk dengan memberikan subsidi 50 persen dari biaya pembentukan badan hukum koperasi melalui kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota.



Gambar 3. 21 Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 3 Juni 2025 pada tanggal 2-3 Juni 2025

10)Rapat Rutin Koordinasi Rutin Wilayah IV (Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT) dalam rangka Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Terbatas Menteri Koordinator Bidang Pangan tanggal 16 Mei 2025, Satuan Tugas Nasional melalui Ketua Pelaksana Harian perlu melakukan rapat koordinasi rutin sesuai wilayahnya dengan jadwal sebagai berikut:

- a. Wilayah I Hari Senin pukul 15.00-16.00 WIB
- b. Wilayah II Hari Selasa pukul 15.00-16.00 WIB
- c. Wilayah III Hari Rabu pukul 15.00-16.00 WIB; dan
- d. Wilayah IV Hari Kamis pukul 15.00-16.00 WIB

Rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk melakukan konfirmasi antara lain:

- a. Pembentukan Satuan Tugas Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Jumlah Desa/Kelurahan yang sudah melaksanakan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus;
- c. Jumlah Berita Acara hasil Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus yang sudah masuk ke Notaris;
- d. Jumlah Surat Keputusan Pendirian Koperasi yang sudah terbit; dan
- e. Penyelesaian *debottlenecking* terhadap kendala dan hambatan.

Rapat dilaksanakan secara daring dengan fasilitas link Zoom Meeting dari Sekretariat Satuan Tugas Nasional dengan Zoom Meeting ID: 894 0133 9397 Passcode: 451395

Peserta rapat yang diundang adalah Ketua Pelaksana Harian, Pelaksana Fungsional, Satuan Tugas Provinsi/Kabupaten/Kota, Anggota sekretariat satuan tugas Nasional dan Pihak terkait lainnya. Hasil rapat koordinasi rutin, harap disampaikan ke Sekretariat Satuan Tugas Nasional yang bertempat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Pelaksana Harian Wilayah IV, melakukan Rutin Koordinasi Rutin pada Hari Kamis. Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus ditargetkan selesai dilakukan pada 31 Mei 2025. Sedangkan Pembentukan badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ditargetkan selesai pada tanggal 30 Juni 2025.



Gambar 3. 22 Rapat Rutin Koordinasi Rutin Wilayah IV (Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT) dalam rangka Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

11) Pembahasan Mock UP/Percontohan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Sehubungan dengan Presiden akan melakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada tanggal 12 Juli 2025 yang bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional, maka ditargetkan pada tanggal tersebut dapat tercapai pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.

Dari 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan dipilih 80 unit sebagai mock up. Mock up Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilakukan sebagai percontohan koperasi yang menjalankan usahanya secara efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.

Koperasi Percontohan (Mock Up) harus memenuhi kriteria memiliki unit usaha:

- a. Kantor;
- b. Sembako;
- c. simpan pinjam;
- d. obat murah/apotek;
- e. klinik desa/kelurahan;
- f. gudang/cold storage
- g. sarana logistik; dan
- h. dapat memiliki kegiatan usaha lain sesuai penugasan pemerintah, kearifan lokal, dan kebutuhan masyarakat desa/kelurahan setempat serta karakteristik wilayah.

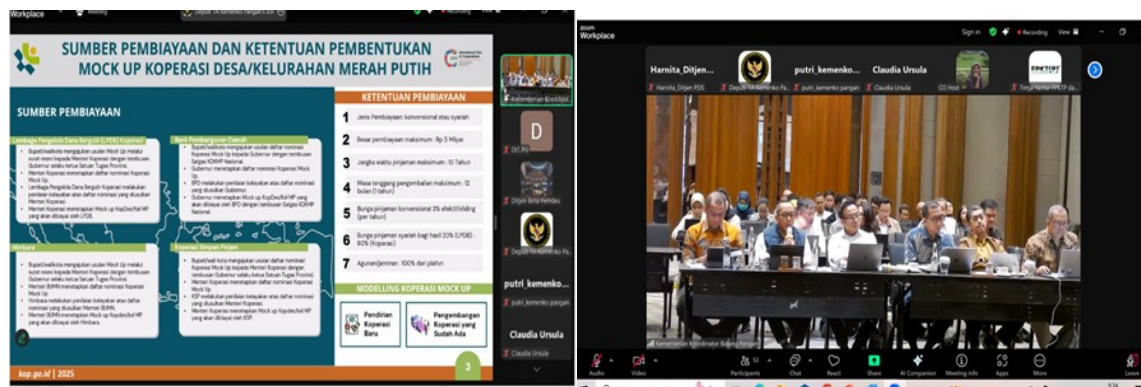
Koperasi Percontohan (Mock Up) harus memenuhi persyaratan:

- a. berbadan hukum Koperasi yang dibuktikan dengan akta Pendirian Koperasi dan Surat Keputusan Menteri Hukum Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi;
- b. memiliki Nomor Induk Koperasi;
- c. memiliki rekening bank atas nama Koperasi;
- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Koperasi; dan

e. memiliki Nomor Induk Berusaha.

Daftar usulan awal mock up disampaikan ke Satgas nasional paling lambat tanggal 24 Juni 2025, dan ditargetkan pada tgl 17 Agustus 2025 bisa terbentuk 80 mock up Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Mekanisme pengusulan mock up dapat diusulkan secara berjenjang, yaitu usulan dari Kabupaten/Kota selanjutnya disampaikan ke Gubernur kemudian diteruskan ke Satgas Nasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai koordinator wilayah IV melakukan validasi kelengkapan unit usaha dan dokumen yang dipersyaratkan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diusulkan sebagai mock up di Provinsi Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT. Dan usulan setiap provinsi akan masih terus dibahas dan bergerak sesuai dengan informasi terbaru saat rapat Satgas Nasional.



Gambar 3. 23 Pembahasan Mock UP/Percontohan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp36.930.865,- atau setara dengan 29,94% dari total pagu sebesar Rp123.346.000,- .

IK5. Nilai Pembiayaan Usaha Kelautan Dan Perikanan Melalui Kredit Program

Direktorat Jenderal PDSPKP terus berupaya mendorong peningkatan nilai pembiayaan usaha KP untuk mendukung keberlanjutan usaha, dengan melakukan fasilitasi kemudahan berusaha dan berinvestasi bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui pendampingan dalam mengakses kredit program yang berasal dari berbagai sumber pembiayaan, serta pengelolaan keuangan sederhana.

Nilai realisasi pembiayaan usaha kelautan dan perikanan adalah nilai realisasi pembiayaan yang berasal dari 2 jenis data penyaluran kredit, yaitu:

a. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Data realisasi KUR dimonitor secara berkala melalui Sistem Informasi Kredit Program Kementerian Keuangan yang diolah lebih lanjut untuk mendapatkan nilai pembiayaan KUR sektor kelautan dan perikanan, baik subsektor hulu maupun hilir.

b. Kredit Ultra Mikro (Kredit UMi)

Data realisasi Kredit Ultra Mikro (UMi) diperoleh secara berkala dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT. Pegadaian sebagai lembaga non bank yang menyalurkan kredit kepada pelaku usaha ultra mikro di sektor kelautan dan perikanan melalui program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera).

Direktorat Pemberdayaan usaha menargetkan nilai Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program pada tahun 2025 sebesar Rp 7,99 Triliun. Untuk mencapai target tersebut, Direktorat pemberdayaan usaha terus berupaya mendorong peningkatan realisasi Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program, antara lain: Pembentukan POKJA Kredit Program Kelautan dan Perikanan, Koordinasi dan sinergi secara berkala dengan lembaga keuangan bank dan nonbank, Fasilitasi Akses Pembiayaan Sektor Kelautan dan Perikanan dan sosialisasi, pembinaan dan sosialisasi dan literasi keuangan.

Tabel 7 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program Triwulan II 2025

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW II terhadap target 2025
	TW II 2025	TW IV 2024	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW IV 2024	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW IV 2024	TW II 2024	
Nilai pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program (Rp. Triliun)	3	10,26	2,3	7,99	3,56	7,77	3,97	3,56	118,67	34,69	154,78	44,55

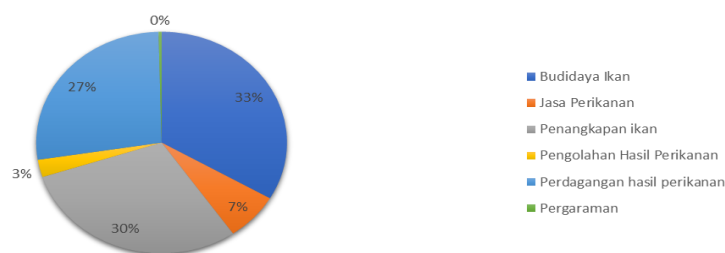
Realisasi Nilai Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program pada Triwulan II sebesar Rp. 3,56 Triliun kepada 142.780 Debitur yang terdiri

atas Rp. 3,1 Triliun kepada 61.809 Debitur bersumber dari KUR usaha KP dan Rp. 0,46 Triliun kepada 80.971 Debitur bersumber dari Kredit UMi.

Capaian nilai pembiayaan sebesar Rp. 3,56 Triliun jika dibandingkan dengan target Triwulan II sebesar Rp. 3 Triliun maka tercapai sebesar 118,67% atau setara dengan 44,55% dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar Rp. 7,99 Triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 maka capaian nilai pembiayaan pada Triwulan II tahun 2025 mengalami penurunan sebesar - 10,11%.

Realisasi nilai kredit program apabila di bandiingkan per sektor usaha kelautan dan perikanan maka pada sektor usaha budidaya terealisasi sebesar 33% atau Rp1,19 Triliun kepada 43.008 debitur; sektor penangkapan ikan terealisasi sebesar 30% atau Rp1,05 Triliun kepada 72.571 debitur; sekor perdagangan kelautan dan perikanan sebesar 27% atau Rp0,96 Triliun kepada 19.910 debitur, sektor jasa perikanan sebesar 7% atau Rp0,25 Triliun kepada 5.661 debitur; sektor pengolahan perikanan sebesar 3% atau Rp0,09 Triliun kepada 1.530 debitur dan sektor pergaraman sebesar Rp0,01 Triliun kepada 100 debitur.

Realisasi Kredit Program Berdasarkan Sektor Usaha Perikanan



Gambar 3. 24 Gambar Realisasi Kredit Program Berdasarkan Sektor Usaha Perikanan

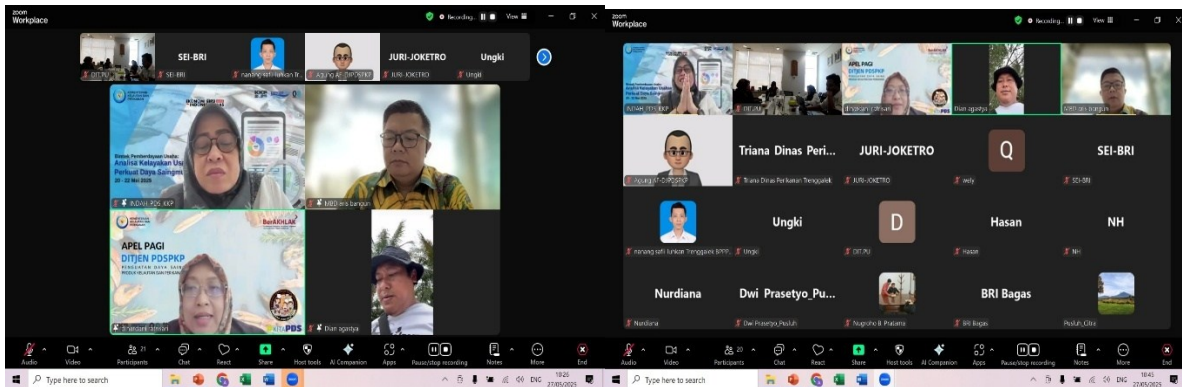
Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan II untuk mendukung capaian tersebut antara lain:

1) Rapat Inisiasi Kredit dan Akses Pembiayaan Berbasis Komunal di Kabupaten Trenggalek

Dalam rangka penguatan UMKM sektor kelautan dan perikanan melalui peningkatan pembiayaan kredit program (KUR, Pembiayaan Ultra Mikro, dan skema pembiayaan lainnya) dan rencana pembentukan ekosistem pembiayaan berbasis komunal di Kabupaten Trenggalek, telah diselenggarakan rapat koordinasi pada hari Selasa, 27 Mei 2025, dengan hasil sebagai berikut:

- Rapat dipimpin oleh Katimja Pembiayaan, dan dihadiri oleh perwakilan Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek, penyuluh perikanan, poklahsar, dan Tim Bank BRI yang terdiri dari divisi *Micro Business Development* dan divisi *Social Entrepreneurship & Incubation*.
- Rapat bertujuan untuk membahas rencana inisiasi kredit dan akses pembiayaan berbasis komunal bagi ekosistem bisnis perikanan di Desa Nglebeng, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur
- BRI menawarkan tiga program pemberdayaan UMKM yang dapat dimanfaatkan:
 - Klasterku hidupku: Membina kelompok usaha yang wilayah usahanya di dalam 1 wilayah berdekatan/sama. Di trenggalek sudah ada binaan BRI di lokasi ini dan bisa dikolaborasikan
 - Desa brilian: pemberdayaan untuk desa, mulai dr kades dan perangkat, bumdes, dan pelaku usaha. Saat ini batch 2 dan 3 akan dimulai awal juli. Syarat sdh ada bumdes/koperasi, atau syarat pelaku usaha, untuk unit kerja terdekat melakukan verifikasi
 - Link umkm: diakses via website, bisa self asesment untuk mendapat rekomendasi diikutsertakan di kelas dan modul sesuai kebutuhan
- Dari program pemberdayaan BRI tersebut, manfaat yang bisa dirasakan oleh pelaku UMKM perikanan adalah:
 - Memberi pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sesuai tema yang dibutuhkan, antara lain: legalitas, tata kelola, inovasi, digitalisasi, pengelolaan keuangan, dan materi teknis sesuai kebutuhan masing-masing kelompok
 - Adanya pendampingan dan pembinaan
 - Terdapat skema bantuan sarana prasarana dari BRI pada tahap akhir pembentukan klaster pembiayaan setelah dilaksanakannya fasilitasi pembiayaan, pembinaan dan pendampingan, sehingga kelompok sudah lebih mandiri.
- Tindak lanjut:
 - Link data referral akan dikirimkan ke pelaku usaha di Kecamatan Panggul melalui Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek untuk bisa menjaring data calon debitur potensial sesuai kebutuhan.

- Data referal dikirim ke BRI pusat dan selanjutnya akan diteruskan ke kantor cabang Trenggalek
- Direktorat PU akan mengirimkan surat resmi kepada BRI untuk penyampaian rekapitulasi data referal, dan juga informasi permohonan untuk diikutsertakan dalam program pemberdayaan yang dimiliki oleh BRI.



Gambar 3. 25 Rapat Inisiasi Kredit dan Akses Pembiayaan Berbasis Komunal di Kabupaten Trenggalek

2) Rapat koordinasi kelompok kerja kredit program Sektor Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka monitoring dan evaluasi realisasi penyaluran Kredit Program Sektor Kelautan Dan Perikanan pada Triwulan I Tahun 2025, telah dilaksanakan rapat koordinasi Kelompok Kerja Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan pada tanggal 30 April 2025, dengan hasil sebagai berikut:

- Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Kemenko Perekonomian, Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan, Biro Perencanaan Setjen KKP, Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan DJPT, Direktorat Ikan Air Payau, Direktorat Ikan Air Laut, Direktorat Ikan Air Tawar, Direktorat Rumpuk Laut DJPB, Setditjen PDSPKP, dan Direktorat Pemberdayaan Usaha, Pusat Penyuluhan BPPSDM, BLU LPUMKP, PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Mandiri, PT. BNI, PT. BSI, PT. PNM dan PT. Pegadaian.
- Nilai realisasi Kredit Program untuk sektor KP pada Triwulan I tahun 2025 adalah sebesar Rp1,85 Triliun yang disalurkan kepada 77.256 debitur. Bila dibandingkan dengan penyaluran KUR pada periode tahun sebelumnya, maka jumlah penerima kredit meningkat sebesar 13,46%, dan nilai penyaluran kredit menurun sebesar 7,85%.

- bidang usaha yang menerima penyaluran kredit program yaitu budidaya ikan, penangkapan ikan, perdagangan hasil perikanan, jasa perikanan, pengolahan hasil perikanan, dan penggaraman
- Kontribusi lembaga penyalur terbesar berasal dari BRI sebesar Rp1,17 triliun untuk 28.397 debitur. Sementara itu, Mandiri dan BSI mencatatkan peningkatan, sedangkan BNI mengalami penurunan akibat fokus pada edukasi dan literasi keuangan.
- PNM menyalurkan Rp248 miliar ke 45.196 debitur melalui skema Mekaar dan Madani Tumbuh, Pegadaian menyalurkan Rp3,42 miliar untuk 216 debitur, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) turut menyalurkan Rp319 juta melalui sembilan lembaga non-bank, dan LPMUKP menyalurkan Rp43,4 miliar untuk 17 debitur dalam skema koperasi dan tanpa agunan untuk kapal penangkapan ikan.
- Penurunan penyaluran KUR secara umum dikaitkan dengan tingginya tingkat *day loss* dan restrukturisasi kelembagaan baru di kabinet, yang berdampak pada penambahan struktur dan tugas Komite Kebijakan Pembiayaan Produksi.
- Pangsa penyaluran KUR sektor KP masih tergolong rendah, yaitu 2,29% dari total KUR nasional. Hal ini menjadi peluang strategis untuk memperluas dukungan pembiayaan untuk pelaku usaha KP, salah satunya dengan mempercepat integrasi data Kusuka ke sistem SIKP Kemenkeu.
- Langkah-langkah strategis KKP selama 2024–2025 dalam mendukung peningkatan realisasi kredit mencakup pembukaan gerai fasilitasi pembiayaan, penempatan pendamping nelayan, pembentukan korporasi budidaya, dan pelibatan penyuluh untuk mendukung akses kredit bagi pelaku usaha KP.
- Usulan tindak lanjut meliputi sinergi antara Himbara dan lembaga pembiayaan non-bank, integrasi data Kusuka-SIKP, serta pengembangan klaster pembiayaan di daerah seperti Tuban, Pangkep, dan Sungailiat.
- Permenko No. 4 Tahun 2025 diterbitkan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap sektor makanan berbasis kelautan dan perikanan, dengan skema pembiayaan hingga Rp10 miliar dan bunga lebih rendah dari kredit komersial.



Gambar 3. 26 Rapat Koordinasi Pokja Kredit Program

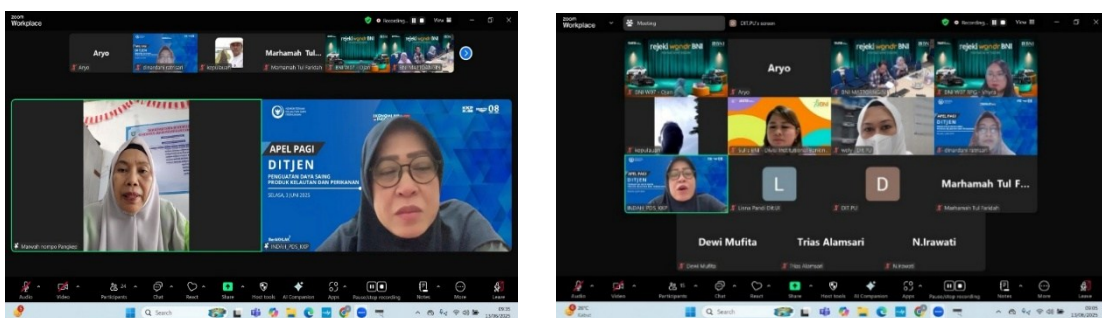
3) Laporan Rapat Koordinasi Inisiasi Kredit dan Akses Pembiayaan Berbasis Komunal di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Dalam rangka penguatan UMKM sektor kelautan dan perikanan melalui peningkatan pembiayaan kredit program (KUR, Pembiayaan Ultra Mikro, dan skema pembiayaan lainnya) serta mendukung program prioritas KKP yakni Kampung Budidaya Merah Putih, Tim Kerja Pembiayaan berupaya untuk melakukan inisiasi kredit dan akses pembiayaan melalui pembentukan ekosistem pembiayaan berbasis komunal di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sehubungan dengan hal tersebut telah diselenggarakan rapat koordinasi pada hari Jumat, 13 Juni 2025, dengan hasil sebagai berikut:

- Rapat dipimpin oleh Katimja Pembiayaan, dan dihadiri oleh Sekretariat Ditjen PDSPKP, Direktorat Pemasaran Ditjen PDSPKP, Direktorat Logistik Ditjen PDSPKP, Direktorat Air Payau Ditjen PB, perwakilan Dinas Perikanan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, penyuluh perikanan, Koperasi Bandeng Sejahtera Kab. Pangkep dan Tim Bank BNI yang terdiri dari divisi *Small Business Program*, divisi *Institutional Banking 1* dan BNI Cabang Mattoangin Makassar.
- Kampung Budidaya Bandeng di Pangkep memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan sebagai ekosistem pembiayaan berbasis komunal, didukung oleh keberadaan Koperasi Bandeng Sejahtera yang berdiri sejak 2019 dengan 371 anggota pelaku usaha dari hulu ke hilir.
- Bantuan pemerintah yang telah diterima koperasi berasal dari KKP dalam bentuk alat pembuat pakan, benih, excavator, dan sarana pasca produksi bandeng.

Selain itu, koperasi juga telah mengikuti Bootcamp Petani Pintar Bank Indonesia sebagai bentuk pemberdayaan UMKM.

- Tantangan yang dihadapi koperasi adalah fluktuasi harga bandeng, yang menimbulkan kebutuhan mendesak akan cold storage sebagai upaya menjaga stabilitas pendapatan dan mengatasi dampak inflasi musiman.
- BNI menyatakan dukungan penuh terhadap program pembiayaan komunal di Pangkep melalui kantor cabangnya. Skema yang disiapkan meliputi pembiayaan perorangan (KUR) dan pembiayaan melalui koperasi sebagai offtaker.
- Penilaian pembiayaan oleh BNI akan mempertimbangkan kebutuhan usaha, dukungan koperasi, keterlibatan dinas dan KKP, serta sinergi antar pelaku, meskipun kerja sama antar pihak hanya sebagai nilai tambah.
- BNI meminta data referal calon debitur untuk dilakukan asesmen, dan siap berkoordinasi di lapangan bila diperlukan sosialisasi tambahan pada kelompok tertentu.
- Program pemberdayaan UMKM dari BNI mencakup BNI Xpora untuk mendorong UMKM masuk pasar global, serta Advisory UMKM untuk pelatihan dan persiapan menghadapi pameran internasional.
- Sebagai tindak lanjut, link pengumpulan data referal akan disampaikan ke pelaku usaha melalui penyuluh dan dinas KP Pangkep, serta akan dikirim secara resmi oleh Dit.PU ke BNI bersama permohonan keikutsertaan dalam program pemberdayaan.



Gambar 3. 27 Rapat Koordinasi Inisiasi Kredit dan Akses Pembiayaan Berbasis Komunal di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

4) Kegiatan Fasilitas Akses Pembiayaan Usaha Bagi Pelaku Umkm Di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing Pada Tanggal 18 Juni 2025

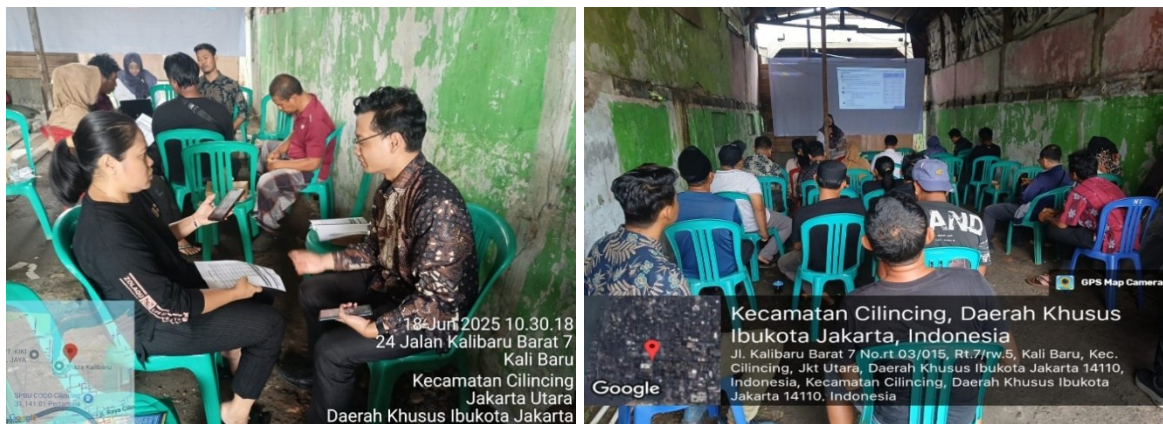
Dalam rangka penguatan UMKM sektor kelautan dan perikanan melalui fasilitas pembiayaan kredit program untuk mendukung program prioritas KKP serta UMKM naik

kelas, telah diselenggarakan kegiatan fasilitasi akses pembiayaan usaha bagi pelaku UMKM di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing pada tanggal 18 Juni 2025, dengan hasil sebagai berikut :

1. Kegiatan dibuka oleh Katimja Pembiayaan dan dihadiri oleh pelaku usaha perikanan dari kawasan Kalibaru, Cilincing, perwakilan Bank Mandiri, Suku Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Jakarta Utara Timja Pelayanan dan Kemitraan Usaha, Timja Kewirausahaan.
2. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan literasi keuangan pelaku usaha perikanan, menyediakan informasi akses pembiayaan seperti KUR dan skema lainnya, mendorong pencatatan keuangan sederhana untuk keberlanjutan usahn serta pemberdayaan usaha.
3. Selain melakukan sosialisasi dan fasilitasi akses pembiayaan, Direktorat Pemberdayaan Usaha bersama Bank Mandiri cabang Semper juga memberikan layanan konsultasi dan pengecekan bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan permohonan pinjaman KUR atau layanan perbankan lainnya, dengan hasil sebagai berikut:
 - Sebanyak 10 pelaku usaha pengolah dan pemasok ikan asin menerima layanan konsultasi untuk akses pembiayaan, dengan kisaran pinjaman Rp25–100 juta. Mereka telah menyerahkan KTP dan foto usaha kepada Bank Mandiri untuk proses BI checking, serta difasilitasi dalam pembukaan rekening baru dan pembuatan akun QRIS.
 - Dalam proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bank Mandiri masih mensyaratkan agunan berupa BPKB kendaraan, mengingat wilayah Cilincing dikategorikan sebagai kawasan berisiko tinggi.
4. Secara paralel, Tim Pembiayaan Usaha melakukan pendataan tingkat literasi keuangan melalui pengisian kuesioner oleh peserta sebagai bagian dari upaya pemetaan dan pemberdayaan berkelanjutan.
5. Tindak lanjut:
 - a. Bank Mandiri akan melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap permohonan calon debitur yang telah menyampaikan dokumen persyaratan pengajuan kredit.

b. Direktorat Pemberdayaan Usaha akan memantau kembali perkembangan realisasi penyaluran kredit di kawasan Cilincing pada periode Juli 2025

Tim pendamping Suku Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Jakarta Utara akan mendata kembali pelaku usaha kelautan dan perikanan di Kelurahan Kalibaru Cilincing dan menyampaikan rekapitulasi calon debitur baru kepada Direktorat Pemberdayaan Usaha

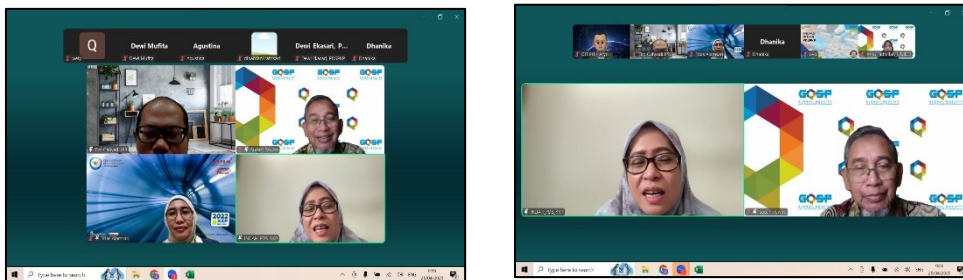


5) Rapat Koordinasi Persiapan Pemetaan Tingkat Literasi Keuangan Umkm Kelautan Dan Perikanan

- Rapat dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 yang dipimpin oleh Katimja Pengelolaan Literasi Keuangan dan Akses Pembiayaan dan dihadiri oleh Bapak Sudari Prawiro NCTA GQSP UNIDO, Bapak Eko Cahyadi expert GQSP UNIDO, Ibu Aniq Fadillah COO GQSP UNIDO, Katimja Kerja Sama dan Humas Setditjen PDSPKP, Katimja Kewirausahaan dan staf lingkup Timja Pengelolaan Literasi Keuangan dan Akses Pembiayaan Direktorat Pemberdayaan Usaha.
- Tujuan rapat adalah untuk melakukan koordinasi persiapan kegiatan pemetaan tingkat literasi keuangan dengan UNIDO.
- Pimpinan rapat menyampaikan paparan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ditjen PDSPKP untuk mendukung UMKM naik kelas, rencana kegiatan literasi keuangan tahun 2025 dan tahapan kegiatan pemetaan tingkat literasi keuangan yang akan mendapatkan dukungan dari pihak UNIDO.
- Pada tahun 2025, rencana kegiatan literasi keuangan sebagai berikut: 1) Pemetaan Tingkat Literasi Keuangan UMKM yang telah dikurasi, 2) Penyusunan rencana intervensi sesuai tingkatan literasi, 3) Penyusunan modul edukasi literasi keuangan, 4) Pelaksanaan *Training of Trainer* kepada para penyuluh, 5)

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi literasi keuangan dan 6) Pendampingan literasi keuangan oleh penyuluh

- Target UMKM yang akan dipetakan adalah 647 UMKM yang telah dikurasi oleh Ditjen PDSPKP dengan menyebarkan kuesioner.
- Penyusunan kuesioner akan mulai dilaksanakan mulai minggu ke-4 April dengan bantuan tenaga ahli dari UNIDO. Kuesioner akan disusun dengan format yang sederhana, mudah dipahami dan dapat memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi UMKM agar dapat diformulasikan solusinya.



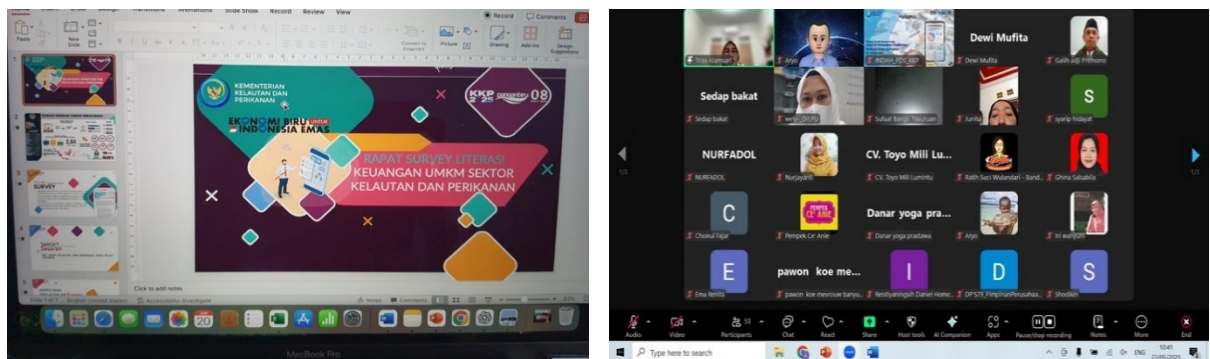
Gambar 3. 28 Rapat Koordinasi Persiapan Pemetaan Tingkat Literasi Keuangan Umkm Kelautan Dan Perikanan

6) Rapat Survei Literasi Keuangan Umkm Sektor Kelautan Dan Perikanan

- Rapat dilaksanakan pada pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 yang dipimpin oleh Katimja Pembiayaan Direktorat Pemberdayaan Usaha dan dihadiri oleh sekitar 50 UMKM sektor kelautan dan perikanan dari berbagai daerah yang telah dikurasi oleh Ditjen PDSPKP dan timja pembiayaan.
- Tujuan rapat adalah untuk memberikan informasi kepada UMKM sektor kelautan dan perikanan agar mengikuti survei yang dilakukan oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha dalam rangka mengukur tingkat literasi keuangan UMKM sektor kelautan dan perikanan.
- Survei dilakukan melalui kuesioner yang dibagikan kepada sekitar 647 UMKM sektor kelautan dan perikanan yang telah dikurasi oleh Ditjen PDSPKP sebagai populasinya.
- Survei bertujuan untuk mengukur pemahaman dan ketrampilan pelaku usaha UMKM, khususnya yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan, dalam mengelola keuangan pribadi maupun usaha serta meningkatkan akses ke layanan keuangan. Hal ini menjadi dasar perencanaan program pelatihan dan

pendampingan yang tepat sasaran menuju UMKM menjadi *bankable* dan naik kelas.

- Terdapat 6 aspek yang dinilai dalam survei yaitu 1) keuangan dasar, 2) keuangan pribadi, 3) keuangan untuk usaha, 4) teknologi dan inovasi keuangan, 5) sikap terhadap keuangan, dan 6) pengambilan Keputusan keuangan.
- Kuesioner terdiri dari 100 pertanyaan yang membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk mengisinya dengan link sebagai berikut https://bit.ly/Kuesioner_Pemetaan_Literasi_Keuangan
- Pada kesempatan pertemuan, terdapat sekitar 60 UMKM sektor kelautan dan perikanan yang telah mengisi kuesioner dimaksud.
- Rencana tindak lanjut:
- Mengirimkan surat kepada seluruh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menghimbau UMKM yang telah dikurasi untuk mengikuti survei dimaksud.
- Memantau perkembangan pengisian kuesioner oleh UMKM sektor kelautan dan perikanan



Gambar 3. 29 Rapat Survei Literasi Keuangan Ukm Sektor Kelautan Dan Perikanan

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp45.315.793,- atau setara dengan 42,17% dari total pagu sebesar Rp107.448.000,-. Penggunaan anggaran pada triwulan II ini sangat efektif dimana capaian kegiatan mencapai 44,55% dengan penggunaan anggaran sebesar 42,17%.

3.2.3 Sasaran Strategis 3

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan

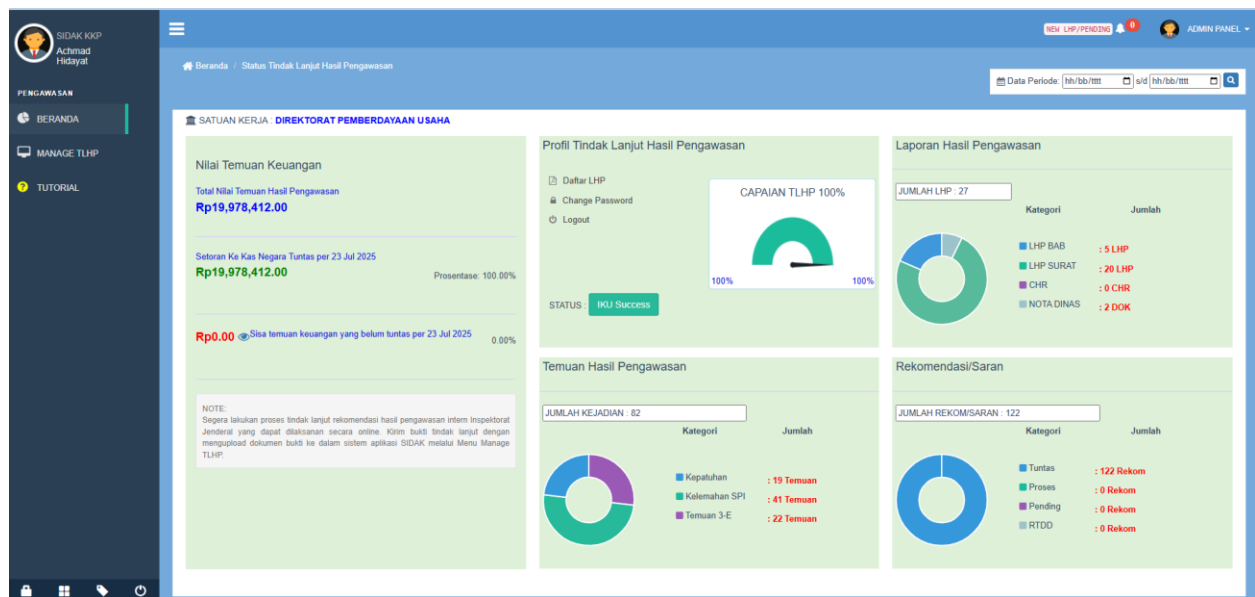
IK6. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha merupakan Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik berdasarkan surat maupun bab) yang terbit dan yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Unit Kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha sampai dengan waktu pengukuran.

Berdasarkan monitoring tindak lanjut atas hasil pengawasan Itjen KKP melalui Aplikasi SIDAK pada Triwulan II 2025, Nilai Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Direktorat Pemberdayaan Usaha sebesar 100% atau setara dengan 105,26% dari target triwulan II. Nilai tersebut diperoleh dari penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan oleh Inspektorat Jenderal tahun 2024 yang telah diselesaikan secara Tuntas dan telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha.

Tabel 8 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW I terhadap target 2024
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	s.d TW I 2025	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha (%)	95	80	80	95	100	100	100	100	105,26	125	125	105,26



Gambar 3. 30 Tangkap Layar Aplikasi SIDAK pada 30 Juni 2025

IK7. Persentase penyelesaian temuan BPK di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Ditjen PDSPKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha pada tahun 2025 ditargetkan 100. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini nilai capaian kinerja belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025

IK8. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Secara teknis unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 .

Tabel 9 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW I terhadap target 2025
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	s.d TW I 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	
Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	-	75	-	75	-	82,33	-	-	-	109,77	-	-

Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha tahun 2025 ditargetkan sebesar 75. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini nilai capaian kinerja Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025.

Dalam rangka pencapaian target dimaksud, Direktorat Pemberdayaan Usaha telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam upaya pemenuhan indikator kinerja Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yaitu dengan melibatkan seluruh pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha untuk menindaklanjuti hasil revidi Inspektorat Jenderal pada periode sebelumnya, melalui rapat koordinasi intensif pada masing-masing area dengan dukungan dari Sekretariat Ditjen PDSPKP, serta melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan untuk penilaian WBK.

IK9. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai AKIP merupakan penilaian terhadap penerapan AKIP pada instansi pemerintah yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada penerapan outcome dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih

baik. Bentuk kegiatan pendukung pada IKU ini adalah evaluasi pengukuran kinerja dan revidi laporan kinerja bersama APIP yang pengukurannya bersifat tahunan, sehingga belum dapat dihitung nilai capaiannya pada triwulan berjalan.

Nilai PM SAKIP Unit Eselon II diperoleh dari penilaian mandiri unit kerja Eselon I berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi pada aplikasi Kinerjaku KKP yang mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan Ditjen PDSPKP.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha pada tahun 2025 ditargetkan 86. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini nilai capaian kinerja belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025.

IK10. Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai indeks profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN yang diukur setiap tahun oleh Bagian SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Ditjen PDSPKP. Kegiatan pendukung untuk IKU ini adalah dalam bentuk pengembangan SDMA serta kegiatan monitoring dan evaluasi pada SDMA.

Tabel 10 Ikhtisar Pencapaian Indikator Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Realisasi terhadap Target	Persentase Realisasi s.d TW II terhadap target 2025

	TW II 2025	TW IV 2024	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW IV 2024	TW II 2024	s.d TW II 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW II 2024	
Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Usaha (Indeks)	87	87	75	87	87,67	92,05	85,11	87,67	100,77	100,77	116,89	100,77

Pada triwulan II tahun 2025, capaian Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha adalah 81,39. Capaian ini setara dengan 107,09% terhadap target triwulan II tahun 2024 yakni 76. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 87, maka capaian triwulan II tahun 2024 telah mencapai 93,55%. Capaian ini setara dengan 107,09% terhadap target triwulan II tahun 2023 yakni 76.

IK11. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan, replikasi maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Inovasi pelayanan publik yang sudah diterapkan oleh unit kerja dapat diikuti dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) adalah kegiatan penjaringan, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada Inovasi yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Untuk mengikuti KIPP, setiap unit kerja mengirimkan proposal inovasi yang memuat informasi, gagasan atau ide mengenai inovasi sesuai dengan format yang

ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK). Proposal inovasi tersebut dikirimkan kepada Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan cara mengunggah proposal pada SINOVIK.

Tabel 11 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW I terhadap target 2025 Tahun 2025
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	
Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha	-	1	-	1	-	2	-	-	-	200	-	-

Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha tahun 2025 ditargetkan sebanyak 1 inovasi. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini nilai capaian kinerja belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025.

Kriteria Inovasi Pelayanan Publik mencakup: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi dan berkelanjutan. Sedangkan kelompok inovasi mencakup: kelompok umum dan kelompok khusus. Perhitungan perhitungan capaian untuk aspek penilaian kelompok umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), signifikansi (25%), kontribusi terhadap capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (5%), adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%) dan kolaborasi pemangku kepentingan (5%). Aspek penilaian kelompok khusus mencakup pembaruan/peningkatan inovasi (25%), adaptabilitas (20%), penguatan keberlanjutan (25%) dan evaluasi (30%).

BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kehadiran Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Periode Triwulan II Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Dalam melaksanakan arah kebijakan pembangunan nasional 2025-2029 yakni Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru serta Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, Direktorat Pemberdayaan Usaha selama periode triwulan II tahun 2025 telah melaksanakan berbagai program seperti upaya pemberdayaan kelompok usaha masyarakat, fasilitasi akses permodalan, pemetaan dan promosi investasi, pengembangan kewirausahaan dan pengembangan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan dimana merupakan bagian dari kontribusi nyata dalam menjawab tantangan ketimpangan ekonomi dan keterbatasan akses pelaku usaha kecil terhadap sumber daya produksi serta mendorong peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

Meskipun berbagai pencapaian positif telah diraih, kami menyadari masih terdapat berbagai tantangan dan kendala, baik dari aspek regulasi, sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, maupun dinamika ekonomi global yang memengaruhi sektor kelautan dan perikanan nasional. Oleh karena itu, hasil evaluasi dari laporan ini akan menjadi landasan penting dalam perbaikan kebijakan dan strategi ke depan, guna memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan dapat memberikan dampak nyata bagi pemberdayaan pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia.

4.2. Rekomendasi

Secara umum, beberapa rekomendasi tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk pencapaian Indikator Kinerja sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan pada periode mendatang antara lain:

1. Sosialisasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota serta DPMPTSP terkait perizinan berusaha;
2. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan usaha
3. Melaksanakan koordinasi dengan Kelompok Kerja Pembiayaan Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan dalam upaya peningkatan nilai pembiayaan sektor kelautan dan perikanan.

4.3. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang telah dilaksanakan atas rekomendasi pada triwulan I 2025, sebagai berikut:

No	Rekomendasi Triwulan I 2025	Tindak Lanjut Pada Triwulan II 2025
1	Sosialisasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota serta DPMPTSP terkait perizinan berusaha;	Telah dilaksanakan kegiatan Dalam rangka meningkatkan pemahaman kepada pelaku usaha terkait Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan, Pemasaran dan Jasa Pasca Panen, pada tanggal 17 Juni 2025. Peserta Rapat; Sesditjen PDSPKP, Katimja PTSA KKP, DKP Bali, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepri, Lampung, Maluku, NTB, NTT, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan para pelaku usaha subsektor pengolahan.
2	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan usaha sektor kelautan dan perikanan	Telah dilaksanakan kegiatan :

		1. Pendampingan dan Audiensi Minat Investasi Perikanan di Kabupaten Pohuwato dan beberapa perusahaan swasta. 2. Sosialisasi Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 3. Kegiatan pembinaan dan pendampingan wirausaha KP dilaksanakan pada tanggal 18 dan 19 Juni 2025 dengan tema Webinar Pemberdayaan Usaha Series. Kegiatan tersebut mengundang wirausaha sektor kp yang eksisting, wirausaha baru sektor kp, serta Dinas Kelautan dan Perikanan daerah secara daring. 4. Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi akses pembiayaan di Trenggalek dan Cilincing Jakarta Utara
3	Melaksanakan koordinasi dengan Kelompok Kerja Pembiayaan Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan dalam upaya peningkatan nilai pembiayaan sektor kelautan dan perikanan.	Dalam rangka monitoring dan evaluasi realisasi penyaluran Kredit Program Sektor Kelautan Dan Perikanan pada Triwulan I Tahun 2025, telah dilaksanakan rapat koordinasi Kelompok Kerja Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan pada tanggal 30 April 2025,

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PEMBERDAYAAN USAHA



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132
LAMAR www.kkp.go.id SUREL persuratan.pds@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PEMBERDAYAAN USAHA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Catur Sarwanto**
Jabatan : Direktur Pemberdayaan Usaha

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **Budi Sulistiyo**
Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan

Budi Sulistiyo

Pihak Kesatu,
Direktur Pemberdayaan Usaha

Catur Sarwanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN USAHA**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Investasi Kelautan dan Perikanan	1.	Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	7,24
		2.	Jumlah Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran yang Diterbitkan (Sertifikat)	50
2.	Meningkatnya Omset UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	3.	Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Omsetnya (Persen)	5
		4.	Persentase Peningkatan Kinerja Lembaga Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan (Persen)	6
		5.	Nilai Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program (Rp. Triliun)	7,99
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	6.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Persen)	95
		7.	Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Persen)	100
		8.	Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk pemeliharaan Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	75
		9.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	86
		10.	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Indeks)	87
		11.	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha (Inovasi)	1

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
<i>PROGRAM : Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</i>	
Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	12.619.000.000
Total Anggaran Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2025	12.619.000.000

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan



Budi Sulistiyo

Pihak Kesatu,
Direktur Pemberdayaan Usaha



Catur Sarwanto

Lampiran 2.

Memorandum penyampaian capaian dan data dukung laporan kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan I

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

MEMORANDUM
Nomor 247/DJPDPSPK.3/TU.140/IV/2025

Yth. : Direktur Jenderal PDSPKP
Dari : Direktur Pemberdayaan Usaha
Hal : Penyampaian Realisasi Capaian IKU Level II dan Realisasi Anggaran Direktorat Pemberdayaan Usaha Periode Triwulan I Tahun 2025
Lampiran : Satu berkas
Tanggal : 16 April 2025

Dalam rangka pemenuhan pelaporan kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan anggaran yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pemberdayaan Usaha yang telah dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)

Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan merupakan nilai total realisasi penanaman modal usaha sektor kelautan dan perikanan (Usaha penangkapan ikan, Usaha perikanan budidaya, Usaha pengolahan ikan, Usaha garam, Usaha pemasaran/perdagangan, Jasa perikanan) baik yang bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2025.

Realisasi Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan pada triwulan I tahun 2025 diperkirakan mencapai **Rp. 1,75 Triliun** yang terdiri dari PMA sebesar Rp384,98 Miliar dan PMDN sebesar Rp1,36 Triliun. Capaian tersebut setara dengan 104,79% dari target triwulan I sebesar Rp1,67 Triliun dan setara dengan 24,17% dari target tahun 2025 sebesar Rp7,24 Triliun.

2. Jumlah Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran yang Diterbitkan (Sertifikat)

Jumlah Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran yang diterbitkan merupakan jumlah dokumen perizinan berusaha sub sektor pengolahan dan pemasaran baik itu permohonan baru, perpanjangan, maupun perluasan yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha.

dan dampak terhadap anggota koperasi dan masyarakat. Target peningkatan kinerja lembaga usaha sektor kelautan dan perikanan sebesar 6% dan akan dilaporkan di akhir tahun, sehingga pada triwulan I nilai Persentase Peningkatan Kinerja Lembaga Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan belum dapat dihitung capaian realisasinya.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung Indikator kinerja tersebut telah dilakukan pendataan awal terhadap lembaga usaha yang telah dibina tahun sebelumnya, melakukan kegiatan pendampingan dan pembinaan lembaga usaha, fasilitasi inisiasi pembentukan lembaga usaha, dan fasilitasi perluasan pasar untuk pengembangan lembaga usaha.

5. Nilai Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan Melalui Kredit Program (Rp. Triliun)

Nilai Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program merupakan Jumlah nilai realisasi pembiayaan usaha KP yang bersumber dari penyaluran kredit program, yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi) kepada pelaku usaha KP yang disalurkan oleh lembaga keuangan Bank maupun Non Bank.

Realisasi Nilai Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program pada Triwulan I sebesar **Rp. 1,59 Triliun** kepada 71.865 Debitur yang terdiri atas Rp. 1,34 Triliun kepada 27.375 Debitur bersumber dari KUR usaha KP dan Rp. 0,25 Triliun kepada 44.490 Debitur bersumber dari Kredit UMi.

Capaian nilai pembiayaan sebesar Rp. 1,59 Triliun jika dibandingkan dengan target Triwulan I sebesar Rp. 1,2 Triliun maka tercapai sebesar 132% atau setara dengan 19,90% dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar Rp. 7,99 Triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 maka capaian nilai pembiayaan pada Triwulan I tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 15,02%.

6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha merupakan Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Unit Kerja Direktorat

Jumlah **realisasi Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran** ikan yang telah Diterbitkan pada triwulan I tahun 2025 sebanyak **17 sertifikat** yang terdiri dari 8 (Delapan) Sertifikat Standar untuk usaha pengolahan ikan dan 9 (Sembilan) Sertifikat Standar untuk usaha pemasaran ikan. Jika dibandingkan dengan target triwulan I sebanyak 10 sertifikat maka realisasi jumlah perizinan berusaha tercapai sebesar 170% dan jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebanyak 50 maka realisasi pada triwulan I mencapai 34%.

3. Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Omsetnya (Persen)

Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Omsetnya merupakan persentase jumlah UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang meningkatkan omsetnya pasca pembinaan dan pendampingan menuju UMKM Naik Kelas dibandingkan dengan Jumlah UMKM yang dibina. Indikator Kinerja ini dilaporkan secara tahunan, sehingga pada triwulan I nilai Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Omsetnya belum dapat dihitung capaian realisasinya.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung Indikator kinerja tersebut adalah kegiatan pembinaan dan pendampingan wirausaha kelautan dan perikanan yang dilakukan secara luring di Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara dengan melibatkan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kota Jakarta Utara dan secara daring dengan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan di beberapa daerah.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui proses bisnis UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan sehingga dapat ditentukan aspek yang akan dibina untuk meningkatkan omsetnya.

4. Persentase Peningkatan Kinerja Lembaga Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan (Persen)

Persentase Peningkatan Kinerja Lembaga Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan tingkat perbandingan kemampuan lembaga usaha sektor KP antara sebelum dan setelah dilakukan penguatan lembaga mengacu pada 3 parameter yaitu operasionalisasi kelembagaan, kinerja kelembagaan

Pemberdayaan Usaha sampai dengan waktu pengukuran.

Nilai realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Direktorat Pemberdayaan Usaha pada Triwulan I tahun 2025 sebesar **100%** atau setara dengan 105,26% dari target triwulan I. Nilai tersebut diperoleh dari penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan oleh Inspektorat Jenderal tahun 2024 yang telah diselesaikan secara Tuntas.

7. Realisasi Pengelolaan Anggaran

Dalam mendukung capaian Indikator Kinerja tersebut diatas, Direktorat Pemberdayaan Usaha pada tahun 2025 mengelola anggaran sebesar Rp. 12.619.000.000,- dengan anggaran terblokir dan efisiensi sebesar Rp. 10.796.253.000,- sehingga anggaran efektif yang dikelola oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha sebesar Rp. 1.822.747.000,-.

Jumlah **realisasi anggaran Direktorat Pemberdayaan Usaha** pada periode Triwulan I sebesar **Rp. 81.018.286,-** atau setara dengan 4,44% dari Pagu Efektif sebesar Rp. 1.822.747.000,-.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak Dirjen lebih lanjut kami mengucapkan terima kasih.


Ditandatangani
Secara Elektronik
Catur Sarwanto

Tembusan
Sekretaris Direktorat Jenderal PDSPKP

Lampiran 3

Evaluasi Rencana Aksi Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan II 2025

RENCANA AKSI DIREKTORAT PEMBERDAYAAN USAHA TAHUN ANGGARAN 2025																															
SASARAN / INDIKATOR KINERJA	KEGATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp. 000)	REALISASI ANGGARAN	TARGET KEGATAN	SATUAN KEGATAN	TARGET OUTPUT BERKALA												REALISASI OUTPUT BERKALA												Pemasukan	Rekomendasi
						Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des		
Meningkatnya investasi kegiatan dan perbaikan		550.797	40.517																												
1. Nila Investasi Kegiatan dan Perbaikan	Promosi usaha dan investasi KP	382.340	28.117	2	Promosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Peningkatan Pemasaran Kawasan Sektor KP	123.250	0	1	Bidang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. Jumlah perbitan bencana sub sektor Pengolahan dan Pemenuhan yang diberikan	Facilitasi perbitan bencana sub sektor pengolahan dan pemenuhan	51.402	14.400	25	Badan Usaha	1	2	4	5	6	8	12	12	16	18	19	20	-	-	4	5	6	8								
Meningkatnya Omzet UMKM Pengolahan Produk Keluaran dan Perbaikan		1.281.950	40.488																												
3. JAKM Pengolahan Produk KP yang Meningkatkan Omzet	Pertumbuhan dan Pembinaan Wirausaha KP	1.031.058	17.383	675	UMKM	-	20	65	60	70	85	65	100	110	120	130	675	-	20	65	60	70	85								
4. Peningkatan kinerja lembaga usaha sektor keluaran dan perbaikan	Peningkatan kapasitas Lembaga usaha KP	123.340	4.400	22	Lembaga	-	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5	22	-	1	2	2	2	3								
5. Nila Pembiayaan usaha KP melalui kredit program	Facilitasi Akses Pembiayaan Kredit Program	104.905	16.221	307	UMKM	-	10	20	20	20	30	35	40	40	50	52	307	-	10	20	20	20	30								
	Facilitasi Kemitraan Usaha	2.540	2.488	30	UMKM	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	1							
Tetapaknya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas sehari-hari di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha																															
6. Penetapan Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Petakan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha	Pendampingan dan pemantauan tidak resmi rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk petakan kinerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha			4	Laporan	-	-	1	-	-	2	-	-	3	-	4	-	-	1	-	-	2									
7. Penetapan Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha	Pemeriksaan dokumen tidak resmi temuan laporan hasil pemeriksaan BPK di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha			1	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-								
8. Nila Minimal yang Dipevakan untuk pemenuhan Produk Monev Wilayah Badan Korpri (WBK) di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha	Pemeriksaan dokumen untuk pemenuhan Produk Monev Wilayah Badan Korpri (WBK) di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha			1	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-								
9. Nila Petikan Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha	Pemeriksaan dokumen Petikan Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha			1	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-								
10. Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha	Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha			2	Laporan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1									
11. Inovasi Pelayanan Publik yang Diadopsi pada Unit Kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha	Penyusunan Inovasi Pelayanan Publik yang Diadopsi pada Unit Kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha			1	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-								